KABUPATEN
TANGERANG

2024



LAPORAN AKHIR

INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tigaraksa, Juli 2024

LAPORAN AKHIR

INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN TANGERANG

TIM RISET:

PENGARAH

Ujang Sudiartono, ST., MT.

KETUA:

Marsono, SE.,M.M.

ANGGOTA:

Ardy Firman Syah, S.Pd.,M.M.
Deden Nuryadin, SE.,M.Si.
Dra. Upit Kurniasih, M.Si.
Syamsoe Astra Negara, SPd.I
Hj. Effie Trisnawati, SE., MM.
Saipul Anwar, S.Pd.I, M.Si.
Widyaningsih, SE, MM
Yanti Rakhmawaty
Adi Rohman
Della Alifha Levana

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANGERANG
2024

KATA PENGANTAR

Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, serta mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Adapun tujuan dari penghitungan IKLI adalah untuk melihat kualitas pelayanan infrastruktur Kabupaten Tangerang dari segi ketersediaan fisik (*Availability*), kualitas fisik (*Quality*), kesesuaian (*Appropriateness*), pemanfaatan (*Utility*) dan kontribusi terhadap perekonomian.

Penilaian unsur pelayanan infrastruktur dikembangkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik dan permasalahan infrastruktur yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tangerang, (2023). Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) selanjutnya dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan dari jenis infrstruktur yang perlu perbaikan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Harapan kami semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk secara terus-menerus melengkapi dan memperbaiki penyediaan infrastruktur bagi kepuasan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Tangerang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey ini, Tim Peneliti memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku kepentingan dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Tangerang, Juli 2024

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 11

C. Manfaat 11

D. Ruang Lingkup 12

E. Tahapan Kegiatan 12

F. Agenda Kegiatan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Pemerintah Daerah (Local Government) 14

B. Pembangunan Infrastruktur Daerah 15

C. Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur 16

D. Infrastruktur 18

1. Infrastruktur Fisik 19

2. Infrastruktur Sosial 19

3. Infrastruktur Finansial 20

E. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 24

A. Jenis Penelitian 24

B. Lokasi Penelitian 24

C. Variabel dan Indikator IKLI 24

D. Definisi Operasional Variabel 25

E. Sampling Dan Teknik Sampling 29

F. Teknik Pengumpulan Data 32
G. Teknik Analisis Data 32
a. Uji Validitas 32
b. Uji Reliabilitas 36
H. Analisis Deskriptif Kuantitatif 38
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 39
A. Data Exsisting Infrastruktur Kabupaten Tangerang 39
1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan 39
2. Infrastruktur Air Bersih 43
3. Infrastruktur Perumahan 47
4. Infrastruktur Ruang Publik 50
5. Infrastruktur Pelayanan Publik 53
6. Infrastruktur Irigasi 58
7. Infrastruktur Perhubungan 59
8. Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup 61
B. Uji Validitas dan Reliabilitas 63
C. Karakteristik Responden 65
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 65
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia 66
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 67
4. Analisis data Kuantitatif 68
5. Capaian IKLI Per Kecamatan 79
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Rekomendasi Strategi 83
Daftar Pustaka 87
LAMPIRAN I UJI VALIDITAS 89
LAMPIRAN II UJI RELIABILITAS 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tangerang 4
Tabel 1.2 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera" 9
Tabel 1.3 Agenda Penelitian..... 13
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 32
Tabel 3.2 Jumlah Sampling 39
Tabel 3.3 Kerangka Uji Validitas 41
Tabel 3.4 Kerangka Uji Reliabilitas 43
Tabel 4.1 Panjang Jalan Kabupaten Tangerang.....45
Tabel 4.2 Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang.....46
Tabel 4.3 Data Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang.....46
Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan Air Minum Layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022.....50
Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Minum Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....51
Tabel 4.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci dll. Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....53
Tabel 4.7 Data Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat ditempati di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....54
Tabel 4.8 Data Prosentase rumah berdasarkan luas tanah (m2) Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....54
Tabel 4.9 Data Jumlah Hunian Baru Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....54
Tabel 4.10 Data jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....58
Tabel 4.11 Data Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....58
Tabel 4.12 Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....59
Tabel 4.13 Data Infrastruktur Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 2024.....60

Tabel 4.14 Data insfrastruktur Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024.....61
Tabel 4.15 Data insfrastruktur Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 2024.....61
Tabel 4.16 Data insfrastruktur Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024.....62
Tabel 4.17 Data Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.....62
Tabel 4.18 Data Puskesmas di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....63
Tabel 4.19 Data Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022.....65
Tabel 4.20 Transportasi umum berdasarkan jenis kendaraan Di Kabupaten Tangerang 2021-2023.....67
Tabel 4.21 Data Insfrastruktur Bandara di Kabupaten Tangerang.....62
Tabel 4.22 Daftar Tempat Pengolahan Sampah di Kabupeten Tangerang Tahun 2023.....68
Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas.....69
Tabel 4.24 Hasil Uji Reliabilitas.....71
Tabel 4.25 Perhitungan Nilai Indeks IKLI Capaian Kabupaten Tangerang 2024.....74
Tabel 4.26 Capaian Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Per Kecamatan 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022..... 45
Gambar 4.2 Hasil Nilai Indeks Berdasarkan Jenis Kelamin 72
Gambar 4.3 Hasil Nilai Indeks Berdasarkan Usia 72
Gambar 4.4 Hasil Nilai Indeks Berdasarkan Pendidikan 73
Gambar 4.5 Nilai Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan 75
Gambar 4.6 Nilai Indeks Infrastruktur Air Bersih 76
Gambar 4.7 Nilai Indeks Infrastruktur Pemukiman 78
Gambar 4.8 Nilai Indeks Infrastruktur Ruang Publik 79
Gambar 4.9 Nilai Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik 80
Gambar 4.10 Nilai Indeks Infrastruktur Irigasi 82
Gambar 4.11 NIlai Indeks Infrastruktur Sarana dan prasarana perhubungan 83
Gambar 4.12 Nilai Indeks Infrastruktur Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup 84
Gambar 4.13 Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Per Kecamatan 86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan daya saing Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang berkualitas dan merata disemua wilayah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang menjadi sangat penting sebagai upaya untuk: (1) meningkatkan konektivitas; (2) mendorong investasi; (3) meningkatkan kualitas hidup; (4) pengembangan pariwisata; dan (5) mendukung pengembangan teknologi.

Dengan adanya konektivitas yang baik, Kabupaten Tangerang akan lebih mudah terhubung dengan wilayah lain, sehingga memudahkan distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Hal ini akan meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya transportasi. Disisi lain pembangunan infrastruktur seperti kawasan industri, pelabuhan, dan fasilitas logistik akan menarik lebih banyak investasi ke Kabupaten Tangerang. Investasi ini pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penyediaan infrastruktur publik yang baik, seperti layanan air bersih, listrik, dan sanitasi, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun terkait dengan penyediaan infrastruktur pariwisata yang baik, seperti jalan menuju destinasi wisata, fasilitas akomodasi, dan atraksi wisata, akan menarik lebih banyak wisatawan yang akan berdampak langasung terhadap peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata dan peluang usaha bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang telah mencapai berbagai capaian signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan ini mencakup berbagai sektor penting seperti penataan ruang, penyediaan

infrastruktur dasar, pengembangan permukiman, transportasi, dan telekomunikasi. Adapun capaian infrastruktur tersebut di Kabupaten Tangerang dideskripsikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur

   Penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus utama di Kabupaten Tangerang. Penataan ruang yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya untuk mencapai hal ini melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur (Bappedalitbang kabupaten Tangerang, 2024).

2. Penyediaan Infrastruktur Lingkungan

   Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur lingkungan adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kinerja jaringan jalan, dan kinerja drainase. Pada tahun 2021, luas RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Tangerang mencapai 17,05%. Meskipun angka ini masih jauh dari ketentuan minimal 30% yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan luas RTH sesuai dengan kebutuhan minimal yang ditargetkan terpenuhi pada tahun 2045 (Bappedalitbang kabupaten Tangerang, 2024).

   Kinerja jaringan jalan juga menjadi perhatian penting. Peningkatan volume kendaraan yang pesat menyebabkan banyak jalan mengalami kerusakan. Pada tahun 2022, sekitar 27,1% jalan di Kabupaten Tangerang dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, masalah drainase yang tidak optimal menyebabkan peningkatan kejadian banjir

dari 6 kasus pada tahun 2021 menjadi 42 kasus pada tahun 2022. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja saluran drainase dan memperbaiki kondisi jalan.

3. Pengembangan Kawasan Permukiman

   Kesejahteraan masyarakat dalam bertempat tinggal menjadi salah satu fokus utama pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman dengan memastikan setiap rumah tangga terlayani oleh prasarana air minum dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2045, ditargetkan bahwa 100% rumah tangga di Kabupaten Tangerang akan terlayani oleh layanan tersebut.

   Selain itu, upaya penanganan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni terus dilakukan. Pada tahun 2045, ditargetkan tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan permukiman menjadi fokus penting mengingat perkembangan jumlah penduduk yang pesat (Bappedalitbang kabupaten Tangerang, 2024).

4. Pengembangan Sistem Transportasi

   Pemerintah Kabupaten Tangerang juga berupaya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi. Pengembangan infrastruktur jalan dan sarana transportasi massal menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Pada tahun 2045, ditargetkan proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 100%. Selain itu, pengembangan sarana transportasi massal juga diharapkan dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang (Bappedalitbang kabupaten Tangerang, 2024).

5. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam sektor komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2022, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tangerang mencapai 2,66 dengan predikat "baik". Selain itu, cakupan layanan telekomunikasi juga telah mencapai 100% desa di Kabupaten Tangerang yang terlayani oleh jaringan komunikasi. Infrastruktur menara BTS juga telah dibangun di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang, mendukung akses telekomunikasi yang luas dan merata.

Adapun penyajian data Capaian Kinerja berdasarkan Rancangan Awal Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tangerang

No.	Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Tren
1	**Penataan Ruang**							
	Ketaatan terhadap RTRW		90	85	90	90	90	
2	**Lingkungan Hidup**							
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan sumber air minum bersih	%	83,55					
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan sumber air minum layak		80,95	80,26	98,48	97,97	98,55	Fluktuatif (meningkat)
3	**Komunikasi dan Informatika**							
	Daya listrik yang Terpasang	KWh						
	Persentase rumah tangga menggunakan Listrik	%	100	100	100	100	100	
	Persentase penduduk yang menggunakan							

No.	Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Tren
	handphone atau telepon	%	71.35	70.47	63.5	79.46	78.08	
	Jumlah Jaringan Telepon	Desa/ Kelurahan		274	274	274	274	
	Jumlah desa/kelurahan terlayani layanan telekomunikasi	Desa/ Kelurahan		274	274	274	274	
	Jumlah Desa/kelurahan belum terlayani	Desa/ Kelurahan		0	0	0	0	

Sumber : (Bappedalitbang kabupaten Tangerang, 2024)

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat baik dari aspek pembangunan fisik maupun utilitas secara obyektif, komprehensif dan dapat diandalkan. Selanjutnya, definisi dari Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Paradigma baru pelayanan publik memposisikan masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah sebagai penyedia layanan; pemerintah berperan sebagai pelayan Masyarakat serta mempertimbangkan pihak yang dilayaninya.

Adapun capaian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tangerang dijelaskan sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan

   Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 57% pada tahun 2019 menjadi 72,9% pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan

kualitas infrastruktur jalan untuk menunjang mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Selain itu, peningkatan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dari 2,61 pada tahun 2019 menjadi 2,96 pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa layanan aksesibilitas jalan bagi masyarakat semakin baik .

2. Infrastruktur Air Bersih

   Pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Hingga tahun 2022, cakupan layanan air minum rumah tangga mencapai 98,55%, dengan target mencapai 100% pada tahun 2045 . Upaya ini dilakukan melalui perluasan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas layanan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih yang layak.

3. Infrastruktur Perumahan

   Infrastruktur perumahan di Kabupaten Tangerang juga mengalami perkembangan. Persentase layanan sanitasi rumah tangga pada tahun 2022 mencapai 86,63%, dengan target mencapai 100% pada tahun 2045 . Selain itu, terdapat upaya signifikan untuk mengentaskan kawasan kumuh dan menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Persentase rumah layak huni pada tahun 2022 adalah 71,8%, dengan target 100% pada tahun 2045 . Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Infrastruktur Ruang Publik

   Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang publik juga menjadi fokus pembangunan. Pada tahun 2021, luas RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Tangerang mencapai 17,05% . Upaya terus dilakukan untuk mencapai target minimal 30% sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 . Pembangunan dan perawatan RTH bertujuan untuk menyediakan ruang yang sehat dan nyaman bagi

masyarakat serta berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi risiko banjir.

5. Infrastruktur Pelayanan Publik

   Infrastruktur pelayanan publik yang memadai sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik. Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan . Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata juga menjadi prioritas untuk memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

6. Infrastruktur Irigasi

   Ketersediaan air untuk irigasi pertanian sangat penting untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Tangerang. Pembangunan infrastruktur irigasi terus ditingkatkan untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi lahan pertanian . Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

7. Sarana dan Prasarana Perhubungan

   Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Tangerang meliputi peningkatan kualitas jalan, jembatan, serta pengembangan sistem transportasi massal. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk yang meningkat menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki aksesibilitas jalan bagi masyarakat .

8. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup

   Pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Upaya

pengoptimalan fungsi drainase perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir terus dilakukan . Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kejadian banjir dari 6 kejadian pada tahun 2021 menjadi 42 kejadian pada tahun 2022, yang sebagian besar disebabkan oleh masalah saluran drainase yang terhambat. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan infrastruktur drainase menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang positif dalam berbagai aspek. Dari peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemenuhan kebutuhan air bersih, pengembangan perumahan yang layak, hingga penyediaan ruang publik yang memadai. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warganya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka memberikan kualitas pelayanan infrastruktur yang baik dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan IKLI sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang dimuat sebagai indikator sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Secara cascading, IKLI ditetapkan sebagai salah satu indikator dari sasaran pembangunan Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera" pada misi 5 yang bertujuan "Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah", Kemudian, secara hirarki dari tujuan misi Kabupaten Tangerang yang memuat mengenai indeks infrastruktur akan diturunkan kembali dalam bentuk konkret

antara keterkaitan visi dan misi dengan sasaran, strategi serta arah kebijakan pada aspek pemerataan Pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera dalam tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2

Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Misi 5 Meningkatkan pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan
			Membangun akses jalan baru
		Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan pemukiman
			Menyediakan Sarana Air Bersih Masyarakat
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana	Meningkatkan penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi

Sumber : Pemerintah Kabupaten Tangerang (2023)

Berdasarkan tabel diatas, pada target 2022 Kabupaten tangerang memperoleh nilai 95 dalam sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Hal ini tentunya selaras pada LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur di daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekonomi. Pembangunan infrastruktur desa juga telah dilakukan untuk memperlancar akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Implementasi indeks infrastruktur kabupaten Tangerang memiliki urgensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Berikut

adalah beberapa alasan yang menunjukkan urgensi implementasi indeks infrastruktur kabupaten Tangerang:

1. Keterbatasan Infrastruktur : Belum meratanya infrastruktur Kabupaten Tangerang yang signifikan, seperti ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang masih minim. Implementasi indeks infrastruktur dapat membantu dalam identifikasi dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan daerah.
2. Pengembangan Ekonomi : Indeks infrastruktur dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekonomi, terutama melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan : Implementasi indeks infrastruktur dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.
4. Pengembangan Wilayah : Indeks infrastruktur dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Reformasi Birokrasi : Implementasi indeks infrastruktur dapat membantu dalam meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Dalam sintesis, implementasi indeks infrastruktur kabupaten Tangerang memiliki urgensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemampuan daerah, dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tangerang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Serta mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah untuk melihat kualitas pelayanan infrastruktur Kabupaten Tangerang dari segi ketersediaan fisik (Availability), kualitas fisik (Quality), kesesuaian (Appropriateness), pemanfaatan (Utility) dan kontribusi terhadap perekonomian.

C. Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Tangerang diantaranya adalah:

1. Mengetahui persepsi dan ekspektasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang;
2. Sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi perbaikan infrastruktur di Kabupaten Tangerang;

3. Sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan pencapaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang.
4. Sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan indeks kualitas layanan infrastruktur ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup obyek. Pada ruang lingkup wilayah yang dimaksud dalam pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur ini yaitu wilayah yang melaksanakan fungsi administratif dibawah area Kabupaten Tangerang dan meliputi seluruh kecamatan.

Selanjutnya, ruang lingkup obyek infrastruktur sebagai pengumpulan data yang diklusterisasi berdasarkan kriteria pembangunan jalan dan jembatan, irigasi dan berbagai bangunan pemerintah.

E. Tahapan Kegiatan

Kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan riset desain dan instrument
2. Pengumpulan data lapangan
3. Pengolahan data lapangan.
4. Penyusunan laporan penelitian
5. *Ekspose* laporan

F. Agenda Kegiatan

Adapun berdasarkan tahapan kegiatan dan narasi lingkup kegiatan maka waktu kajian ini dilaksanakan dalam 3 bulan dari mei sampai juli 2024 yang dideskripsikan secara jelas melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Agenda Penelitian

NO.	KEGIATAN	BULAN		
		MEI	JUNI	JULI
1	Penyusunan riset desain			
2	pengumpulan data lapangan			
3	Pengolahan data lapangan			
4	Penyusunan Laporan Penelitian			
5	Ekspose Laporan			

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah (Local Government)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan infrastruktur, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang lebih produktif seperti pariwisata dan ekonomi kreatif (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas seperti asas otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi Dekonsentrasi adalah

pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

B. Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Infrastruktur yang baik menjadi tulang punggung bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta merupakan prasyarat penting untuk menciptakan daya saing daerah.

Konsep pembangunan infrastruktur daerah harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal, serta berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial. Langkah awal dalam proses ini adalah identifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak, seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya. Penentuan prioritas ini dilakukan melalui kajian menyeluruh terhadap kondisi eksisting, potensi pertumbuhan, dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, perencanaan pembangunan infrastruktur daerah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antar pihak ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan keberlanjutan operasional infrastruktur tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran krusial sebagai fasilitator dan regulator, yang memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Pendanaan menjadi aspek yang sangat vital dalam pembangunan infrastruktur. Selain mengandalkan anggaran pemerintah, partisipasi swasta melalui skema pembiayaan kreatif seperti Public-Private Partnership juga perlu didorong. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban fiskal pemerintah, tetapi juga

meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek infrastruktur melalui kompetisi dan inovasi dari sektor swasta.

Implementasi proyek infrastruktur harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas. Penggunaan teknologi modern dalam pemantauan dan evaluasi proyek juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

Pembangunan infrastruktur daerah yang terencana dan terintegrasi akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian lokal dan nasional. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan mobilitas, memperluas akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisir, menuju Indonesia yang lebih maju dan merata.

C. Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur

Pengertian pelayanan publik menurut Osborne dan Gaebler (1992) disebutkan bahwa pelayanan publik sebagai upaya pemerintah untuk beralih dari model birokrasi tradisional ke model kewirausahaan dengan cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Subarsono (2005), pelayanan publik didefinisikan sebagai: "Rangkaian akitifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna pelayanan. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud

adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan langsung maupun tidak langsung. Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dalam bentuk barang dan jasa maupun pembangunan fisik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sesuai peraturan perundang undangan".

Pelayanan publik di bidang infrastruktur merupakan elemen penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang menunjang aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi. Pelayanan yang baik dalam bidang ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Pelayanan publik dalam bidang infrastruktur harus berlandaskan pada beberapa prinsip utama: (1) Aksesibilitas dan Keterjangkauan; (2) Kualitas dan Keberlanjutan; (3) Efisiensi dan Transparansi; (4) Inklusivitas; (5) Inovasi dan Teknologi.

Prinsip aksesibilitas dan keterjangkauan, mensyaratkan bahwa infrastruktur harus mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Selain itu, biaya akses dan penggunaan infrastruktur harus terjangkau bagi semua kalangan.

Selanjutnya prinsip kualitas dan keberlanjutan bermakna bahwa infrastruktur harus memenuhi standar kualitas yang tinggi dan dirancang untuk berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien untuk memastikan manfaat jangka panjang.

Prinsip efisiensi dan transparansi menekankan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara efisien dan

transparan. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, dengan pengawasan ketat dan pelaporan yang terbuka kepada publik.

Sedangkan terkait dengan prinsip inklusivitas bermakna bahwa pelayanan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang rentan atau memiliki kebutuhan khusus. Pembangunan harus inklusif, memastikan semua individu mendapatkan manfaat yang sama.

Adapun prinsip inovasi dan teknologi bahwa penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Ini melibatkan penerapan konsep kota pintar (*smart city*), penggunaan material inovatif, dan integrasi sistem informasi serta komunikasi.

Pengertian pelayanan publik bidang infrastruktur menurut Tomás Serebrisky (2017) menyatakan bahwa "infrastruktur yang baik tidak hanya menghubungkan orang dan pasar, tetapi juga menghubungkan orang dengan peluang ekonomi. Ini adalah fondasi dari pembangunan berkelanjutan". Pandangan ini menekankan pentingnya infrastruktur dalam menciptakan akses ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya menurut Bent Flyvbjerg (2014) dalam studinya tentang manajemen proyek infrastruktur besar, menyatakan bahwa "perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk menghindari kegagalan proyek infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses sangatlah penting. Pendapat ini menyoroti pentingnya perencanaan yang detail dan manajemen yang transparan dalam proyek infrastruktur.

D. Infrastruktur

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Oleh karenanya di dalam kehidupan perkotaan infrastruktur memegang peranan yang sangat vital. Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur adalah suatu sistem fasilitas publik yang terdapat di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seperti Jalan dan Jembatan, Transportasi (darat, laut dan udara), Ketersediaan air, drainase, irigasi, serta Infrastruktur Perumahan (Pengelolaan limbah, Drainase, Air Bersih, listrik, telekomunikasi). Dalam ilmu ekonomi, arti infrastruktur ialah wujud modal publik "public capital" yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.(N. Gregory Mankiw, 2003).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Warsilan, 2015).

Dari perspektif yang lebih luas, infrastruktur ini dikategorikan dalam fisik, sosial dan finansial. Untuk kemajuan negara Indonesia harus bisa menyeimbangkan ketiga infrastruktur tersebut. Selanjutnya, pengertian masing-masing infrastruktur tersebut di bawah ini :

1. Infrastruktur Fisik
   Infrastruktur yang satu ini bisa meningkatkan kemajuan Indonesia karena mampu membuat mobilitas menjadi lebih baik. Salah satu wujud infrastruktur fisik adalah transportasi seperti rel kereta, jalan dan sebagainya. Kontribusinya berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi.
2. Infrastruktur Sosial
   Infrastruktur sosial mampu membuat Indonesia lebih maju. Caranya melalui pengayaan SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan

kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat diharapkan Indonesia semakin maju dibandingkan sebelumnya.

3. Infrastruktur Finansial
   Infrastruktur finansial merupakan kerja sama dengan perbankan, pajak finansial negara dan pos. Keberadaan infrastruktur yang satu ini penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

E. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa sumber yang membahas tentang indeks infrastruktur dan pentingnya pengembangan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat:

1. Pengembangan Infrastruktur : Pengembangan infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Suriani & Keusuma, 2015).
2. Hubungan Infrastruktur dengan Indeks Pembangunan Manusia : Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks yang ditetapkan oleh UNDP untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan IPM dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti pendidikan dan Kesehatan (Rosyid, R., & Lukito, L. E., 2019).
3. Jenis-Jenis Infrastruktur : Infrastruktur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti infrastruktur keras dan infrastruktur lunak. Infrastruktur keras meliputi prasarana fisik seperti jalan, jembatan, dan bangunan, sedangkan infrastruktur

lunak meliputi prasarana non-fisik seperti layanan publik dan aturan hukum (Kuswinmaldi, Simon Gilang, 2022).

4. Manfaat Infrastruktur : Infrastruktur memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Diantaranya adalah manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti pendidikan dan Kesehatan (Kuswinmaldi, Simon Gilang, 2022).
5. Keterbatasan Infrastruktur : Keterbatasan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, akses infrastruktur sanitasi yang tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Muliana, 2020).

Adapun dalam penyusunan instrumen menggunakan variabel/dimensi sebagaimana berikut :

1. Jalan dan jembatan

   Jaringan jalan dan jembatan merupakan penghubung suatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya penghubung tersebut maka aktivitas manusia dan barang juga semakin tinggi antar daerah. Dalam perkembangannya, pelayanan jaringan jalan dan jembatan tidak hanya sebatas kuantitas tapi juga kualitas dan kelengkapan sarana pendukungnya.
2. Infrastruktur air bersih

   Persoalan pengaliran air bersih, baik untuk air minum maupun pengairan tanaman (sawah, tumbuhan kota dan sebagainya) menjadi salah satu persoalan yang tidak dapat dihindarkan. Komponen pokoksistem penyediaan air bersih adalah unit sumber air baku, unitpengolahan air, unit transmisi dan unit pelayanan.

3. Infrastruktur perumahan

   Infrastruktur perumahan merupakan dasar fisik lingkungan serta menjadi fasilitas penunjang untuk pelayanan lingkungan dan menjadibagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan.

4. Infrastruktur ruang publik

   Komponen infrastruktur ruang publik meliputi kawasan pedestrian, taman kota dan sarana olahraga.

5. Infrastruktur pelayanan publik

   Komponen infrastruktur pelayanan publik terdiri atas 3 unsur yang diamati diantaranya adalah pendidikan, kesehatan dan pasar.

6. Infrastruktur irigasi

   Infrastruktur irigasi terdiri atas 3 unsur yang diamati diantaranya adalahjaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier.

7. Sarana dan prasarana perhubungan

   Komponen sarana dan prasarana perhubungan terdiri atas 5 unsur yangdiamati diantaranya adalah sarana transportasi bus, sarana transportasi kereta api, sarana transportasi angkutan paratransit, fasilitas terminal, dan fasilitas stasiun.

8. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

   Komponen infrastruktur irigasi terdiri atas 3 unsur yang diamati adalah terkait infrastruktur pengelolaan sampah.

Kemudian, guna pengukuran efektivitas pembangunan pada setiap infrastruktur diatas memiliki batasan dalam pelaksanaannya yang diukur melalui 5 aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan fisik *(availability)*: bahwa dalam setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan output yang berupa barang secara fisik. Hal ini diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik.

2. Kualitas fisik *(quality):* kualitas output yang dihasilkan. Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung oleh kualitas outputyang baik dan optimal.
3. Kesesuaian *(appropriateness):* kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat.
4. Pemanfaatan *(utility):* tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.
5. Kontribusi terhadap perekonomian: hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.

Dalam sintesis, indeks infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan definisi tersebut, pada penelitian ini akan menjelaskan tingkat kepuasan layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui kuesioner. Data yang didapatkan melalui kuesioner yang berupa angka-angka, kemudian diolah untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Tangerang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi dan data untuk proses penelitian. Lokasi penelitian ini adalah berada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Adapun pemilihan sampel lokasi penelitian ini adalah kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

C. Variabel dan Indikator IKLI

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objekatau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).Sedangkan dalam

penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ini variabel/dimensi yang digunakan untuk menilai sektor infrastruktur antara lain sebagai berikut:

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional atau operasionalisasi variabel dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan atau proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep, sehingga konsep tersebut dapat diukur (Zulganef, 2013). Operasionalisasi variabel dapat membantu peneliti untuk memperoleh item-item kuesioner yang memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang baik dalam mengukur. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL/ DIMENSI	INDIKATOR/ ASPEK	ITEM/UNSUR
1	Jalan dan jembatan	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	• Ketersediaan fisik Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten)
		Quality (Kualitas Fisik)	• Kualitas fisik Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten)
		Appropriateness (Kesesuaian)	• Kesesuaian peruntukan Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten)
		Utility (Pemanfaatan)	• Tingkat pemanfaatan Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten)
		Kontribusi terhadap perekonomian	• Kontribusi Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) terhadap perekonomian
2	Infrastruktur air besih	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	• Ketersediaan fisik Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air

NO	VARIABEL/ DIMENSI	INDIKATOR/ ASPEK	ITEM/UNSUR
		*Quality (*Kualitas Fisik)	● Kualitas fisik Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air
		Appropriateness (Kesesuaian)	● Kesesuaian peruntukan Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air
		Utility (Pemanfaatan)	● Tingkat pemanfaatan Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air
		Kontribusi terhadap perekonomian	● Kontribusi Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air terhadap perekonomian
3	Infrastrukturperumahan	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	● Ketersediaan fisik drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet
		*Quality (*Kualitas Fisik)	● Kualitas fisik drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet
		Appropriateness (Kesesuaian)	● Kesesuaian peruntukan drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet
		Utility (Pemanfaatan)	● Tingkat pemanfaatan drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet
		Kontribusi terhadap perekonomian	● Kontribusi drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet terhadapperekonomian
4	Infrastruktur ruang publik	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	● Ketersediaan fisik Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan
		*Quality (*Kualitas Fisik)	● Kualitas fisik Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan

NO	VARIABEL/ DIMENSI	INDIKATOR/ ASPEK	ITEM/UNSUR
		Appropriateness (Kesesuaian)	• Kesesuaian peruntukan Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan
		Utility (Pemanfaatan)	• Tingkat pemanfaatan Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan
		Kontribusi terhadap perekonomian	• Kontribusi Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan terhadap perekonomian
5	Infrastruktur pelayanan publik	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	• Ketersediaan fisik sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)
		Quality (Kualitas Fisik)	• Kualitas fisik sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)
		Appropriateness (Kesesuaian)	• Kesesuaian peruntukan sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)
		Utility (Pemanfaatan)	• Tingkat pemanfaatan sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)
		Kontribusi terhadap perekonomian	• Kontribusi sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)terhadap perekonomian
6	Infrastruktur irigasi	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	• Ketersediaan fisik Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah
		Quality (Kualitas Fisik)	• Kualitas fisik Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah
		Appropriateness (Kesesuaian)	• Kesesuaian peruntukan Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi

NO	VARIABEL/ DIMENSI	INDIKATOR/ ASPEK	ITEM/UNSUR
			sawah
		Utility (Pemanfaatan)	● Tingkat pemanfaatan Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah
		Kontribusi terhadap perekonomian	● Kontribusi Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah terhadap perekonomian
7	Sarana dan prasarana perhubungan	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	● Ketersediaan fisik sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun
		Quality (Kualitas Fisik)	● Kualitas fisik sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun
		Appropriateness (Kesesuaian)	● Kesesuaian peruntukan sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun
		Utility (Pemanfaatan)	● Tingkat pemanfaatan sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun
		Kontribusi terhadap perekonomian	● Kontribusi sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun terhadap perekonomian
8	Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup	*Availability* (Ketersediaan Fisik)	● Ketersediaan fisik infrastrukturpengelolaan sampah
		Quality (Kualitas Fisik)	● Kualitas fisik infrastruktur pengelolaan sampah
		Appropriateness (Kesesuaian)	● Kesesuaian peruntukan infrastruktur pengelolaansampah

NO	VARIABEL/ DIMENSI	INDIKATOR/ ASPEK	ITEM/UNSUR
		Utility (Pemanfaatan)	• Tingkat pemanfaatan infrastruktur pengelolaansampah
		Kontribusi terhadap perekonomian	• Kontribusi infrastruktur pengelolaan sampah terhadap perekonomian

Sumber: Data Diolah, 2022

E. Sampling Dan Teknik Sampling

Penentuan teknik sampel dapat ditentukan dengan beberapa kaidah maupun alternatif sepertiteknik sampling Slovin, Krejie and Morgan maupun teknik sampling yang lain seperti Roscoe. Teknik sampling digunakan untuk merepresentasikan jawaban dan memberikan opsi kepada peneliti terhadap akses hasil sehingga tidak memberatkan peneliti. Kausal utama dalam penentuan sampel adalah mengetahui jumlah populasi dari subjek penelitian.

Dalam penelitian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur ini, teknik sampling yang digunakan adalah *sampling* dimana terdapat beberapa tahapan dalam penentuan objek sampel. Secara teknis teknik sampling yang dipergunakan adalah *purposive random sampling* dari keseluruhan kecamatan yang diambil berdasarkan penghitungan formulasi sampel. Definisi umum teknik *purposive random sampling* tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2014) *purposive random sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Jumlah Sampling yang akan digunakan dalam penyusunan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Tangerang 2024 ini menggunakanteknik sampling Slovin dimana dalam penghitunganya syarat utama dalampenghitungan ini adalah diketahui jumlah total populasi yang ada. Berdasarkan data Tangerang dalam Angka

yang dirilis olehh Badan PusatStatistik Kabupaten Tangerang 2023 jumlah total sampel diketahui sejumlah 3.141.704 jiwa yang terbagi di 29 Kecamatan. Berikut merupakan rumus penghitungan Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N\ x\ e^2)}$$

$$Sampel = \frac{Populasi}{1 + (Populasi\ x\ Tingkat\ Kesalahan^2)}$$

$$Sampel = \frac{3.141.704}{1 + (\ 3.141.704\ x\ 0{,}05^2)}$$

$$Sampel = \frac{3.141.704}{7855{,}26} = 399.95$$

Sampel yang digunakan dalam penelitian IKLI Kabupaten Tangerang berdasarkan penarikan sampel melalui Slovin maka sejumlah 400 sampel merupakan sampel minimum yang diambil dengan teknik sampling probability. Terminologi minimum mengindikasikan bahwa penelitian dinyatakan valid apabila sampel tercukupi pada ambang batas tersebut. Disisi lain kondisi lapangan yang fleksibel dan dinamis memiliki kecenderungan pola ketidak sesuaian jawaban antar individu sehingga menyebabkan instrumen menjadi error. Berdasarkan penarikan sampling probability dengan membagi rata jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Tangerang yang dijadikan sampel, maka dapat digambarkan pola sampling sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Sampling

No	JUMLAH PENDUDUK Kecamatan	TOTAL	RESPONDEN
1	Cisoka	97.591	**12**
2	Solear	101.969	**13**
3	Tigaraksa	163.531	**21**
4	Jambe	55.650	**7**
5	Cikupa	209.140	**27**
6	Panongan	129.996	**17**
7	Curug	176.617	**22**
8	Kelapa Dua	167.553	**21**
9	Legok	124.324	**16**
10	Pagedangan	111.222	**14**
11	Cisauk	89.512	**11**
12	Pasar Kemis	248.577	**32**
13	Sindang Jaya	95.575	**12**
14	Balaraja	124.129	**16**
15	Jayanti	70.728	**9**
16	Sukamulya	74.309	**9**
17	Kresek	71.795	**9**
18	Gunung Kaler	56.160	**7**
19	Kronjo	6.595	**1**
20	Mekar Baru	44.152	**6**
21	Mauk	91.382	**12**
22	Kemiri	50.977	**6**
23	Sukadiri	66.679	**8**
24	Rajeg	188.209	**24**
25	Sepatan	12.326	**2**
26	Sepatan Timur	105.994	**13**
27	Pakuhaji	127.330	**16**
28	Teluknaga	167.977	**21**
29	Kosambi	111.705	**14**
	Kabupaten Tangerang	**3.141.704**	**400**
	PERSENTASE	**100,0%**	

Sumber : (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024)

Berdasarkan hasil penarikan sampel di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang terdapat variasi ragam jumlah sampel. Hal ini dipengaruhi oleh persebaran kepadatan penduduk dna tingkat kemajuan infrastruktur diberbagai kategori wilayah yang bebeda. Dimana semakin tinggi jumlah penduduk maka sangat memungkinkan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan juga banyak. Dari total sampel yang telah disurvei maka terdapat 400 jumlah responden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan komponen yang penting yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua,yaitu:

1. Data primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secaralangsung oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini didapat dengancara menyebarkan kuesioner kepada seluruh sampel penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Tangerang. Adapun pada penelitian ini data primer diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner.

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa catatan atau laporan historis serta dokumen- dokumen yang telah ada pada instansi tempat dilakukannya penelitian.Selain hal tersebut, data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah data-data tentang layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang.

G. Teknik Analisis Data

1. Prakondisi Uji Validitas Dan Reliabilitas
   a. Uji Validitas

      Menurut Morissan (2012:103) pengujian validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris yang menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti. Jadi dengan kata lain instrumen pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi *Product Moment* yang dikemukakan oleh Pearson yaitu sebagai berikut :

$$rxy = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{(n.\ \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(n.\ \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

X = variabel bebas

Y = variabel terikat

N = banyaknya sampel

Namun dengan kriteria pengujian apabila rhitung ≤ rtabel maka tidak terdapat instrument yang valid pada tingkat kepercayaan 95%atau dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Pengujian validitas pada masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan program *IBM SPSS Statistic Ver 23* dengan diujikan kepada 400 masyarakat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Uji Validitas merupakan suatu tahapan untuk menguji instrumen maupun alat ujur untuk mencari tingkat ketepatan dan kecermatan dalam menghjimpun data dari responden. Tingkat kevalidan suatu instrumen mempengaruhi kualitas atau ketepatan item yang adakandiujikan kepada responden. Sehingga valid atau tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai skenario yang diuji. Pengukuran validitas diukur item per item pada semua dimensi dan unsur atau dengan kata lain menguji semua aspek di semua unsur dan dimensi. Setiap item akan dinyatakan valid apabila hasil pengujian SPSS menunjukkan bahwa r (*Product Moment*) hitung memiliki angka lebih besar dari r tabel (*r*hitung > *r*tabel). Berikut merupakan kerangka uji validitas yang terbagi berdasarkan dimensi :

Tabel 3.3

Kerangka Uji Validitas

Dimensi	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Dimensi Jalan dan Jembatan			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	
Dimensi Infrastruktur Air Bersih			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	
Dimensi Infrastruktur Permukiman			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	
Dimensi Infrastruktur Ruang Publik			
ID.1		0,098	

Dimensi	r Hitung	r Tabel	Keterangan
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	
Dimensi Infrastruktur Pelayanan Publik			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	
Dimensi Infrastruktur Irigasi			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	
Dimensi Sarana-Prasarana Perhubungan			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		0,098	

Dimensi	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Dimensi Sarana-Prasarana Pengelolaan Sampah			
ID.1		0,098	
ID.2		0,098	
ID.3		0,098	
ID.4		0,098	
ID.5		**0,098**	

Sumber : (Morissan, 2012)

Berdasarkan hasil uji validitas diatas dapat dilihat bahwa 40 indikator menunjukkan hasil valid dengan signifikasi pada tarah 5% (0,05) dan *r Product moment* pada angka 0,098 atau pada jumlah 400 responden. Dengan jumlah sampel sejumlah 400 maka dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut beruji valid. Selain uji validitas sebagai tahapan menguji alat ukur pengujian reliabilitas juga diperlukan untuk menilai kestabilan atau konsistensi instrumen.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2016:168) reliabilitas merupakan suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan metode *Alpha Cronbach*. Apabila *Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan bila lebih besar atau sama dengan 0,6 dinyatakan reliabel. Adapun perhitungan realibilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut:

$$r_n = \left[\frac{k}{k-1}\right]\left[1 - \frac{\Sigma\sigma_b^2}{V_t^2}\right]$$

Keterangan:
rn = reliabilitas pegawai

k = banyak butir pertanyaan
$\Sigma\sigma_b^2$ = jumlah varian masing-masing
V_t^2 = varians total

Pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistic dengan diujikan kepada 400 masyarakat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Adapun kerangka uji reliabilitas berdasarkan dimensi tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Kerangka Uji Reliabilitas

Dimensi	CronbachAlpha	Standarized CronbachAlpha	Keterangan
Jalan dan Jembatan		> 0,6	
Infrastruktur Air Bersih		> 0,6	
Infrastruktur Permukiman		> 0,6	
Infrastruktur Ruang Publik		> 0,6	
Infrastruktur Pelayanan Publik		> 0,6	
Infrastruktur Irigasi		> 0,6	
Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan		> 0,6	
Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup		> 0,6	
Reliabilitas Total		> 0,6	

Sumber : (Arikunto, 2016)

Uji Reliabilitas mengacu bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden satu dengan karakteristik yang berbeda akan memiliki pemahaman/persepsi yang sama dengan responden dengan karakteristik yang berbeda pula.

H. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Teknik analisis menentukan bentuk output suatu kajian tergantung bagaimana peneliti akan menjawab fenomena yang terjadi dengan metode analisis. Dalam kajian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur paradigma utama yang menjadi inti kaji adalah pada pelayanan khususnya penyediaan jasa infrastruktur. Secara umum parameter dari adanya suatu kegiatan pelayanan(service) adalah kepuasan (Satisfaction). Barata (2004:11) menyederhanakan bahwa suatu aktifitas pelayanan dapat terjadi apabila terpenuhi empat syarat yakni : 1) penyedia layanan (provider); 2) Penerima layanan (user); 3) jenis dan bentuk Layanan dan 4) kepuasan. Sehingga output dari adanya kajian ini adalah mengkategorikan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur yang diberikan.

Analisis deskriptif kuantitatif memberikan gambaran kualitas layanan infrastruktur yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai citizen. Pola penggambaran ditunjukkan melalui skor pada skala 1-5 sebagai wujud Survey Kepuasan Masyarakat. Penerjemahan kuantitatif dikategorikan berdasaran Pencapaian IKLI Kabupaten, pencapaian IKLI Pada Setiap Unsur, Pencapaian IKLI Pada Setiap Dimensi, Pencapaian IKLI Pada setiap Aspek dan Pencapaian IKLI pada setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Skor tersebut diinterpretasikan kedalam pencapaian SKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

A. Data Exsisting Infrastruktur Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan yang pesat baik dari segi ekonomi maupun populasi. Sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta, Kabupaten Tangerang memainkan peran penting dalam perkembangan regional. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai kondisi eksisting infrastruktur di Kabupaten Tangerang:

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Kabupaten Tangerang, sebuah daerah yang berkembang pesat di Provinsi Banten, memiliki infrastruktur jalan dan jembatan yang penting untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi infrastruktur ini masih menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa ruas jalan mengalami kerusakan, terutama di daerah pinggiran dan perdesaan. Kerusakan ini disebabkan oleh beban kendaraan berat, cuaca, dan kurangnya perawatan rutin. Data panjang jalan Kabupaten Tangerang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Panjang Jalan Kabupaten Tangerang

No.	Status Jalan	Panjang Jalan	Keterangan
1.	Jalan Nasional	35,44 Km	
2.	Jalan Provinsi	110,13 Km	
3.	Jalan Kabupaten	992,61 Km	

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Karawang 2024

Adapun terkait dengan kondisi jalan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan	Keterangan
1.	Baik	947,81 Km	95,49 %
2.	Sedang	30,80 Km	3,10 %
3.	Rusak Ringan	13,00 Km	1,31 %
4.	Rusak Berat	1,00 Km	0,10 %

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Karawang 2024

Data secara rinci terkait kondisi jalan di Kabupaten Tangerang per Kecamatan tahun sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Data Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan	Panjang Jalan
1	Balaraja	Baik	34,5
2	Jayanti	Baik	31,3
3	Tigaraksa	Baik	60,85
4	Jambe	Baik	26,4
5	Cisoka	Baik	14,5
6	Kresek	Baik	31,9
7	Kronjo	Baik	35,8
8	Mauk	Baik	19,8
9	Kemiri	Baik	27,55
10	Sukadiri	Baik	29,95
11	Rajeg	Baik	53,75
12	Pasar Kemis	Baik	37,55
13	Teluknaga	Baik	45,15
14	Kosambi	Baik	19,6
15	Pakuhaji	Baik	43,7

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan	Panjang Jalan
16	Sepatan	Baik	25,3
17	Curug	Baik	34,86
18	Cikupa	Baik	59,05
19	Panongan	Baik	24,4
20	Legok	Baik	18,8
21	Pagedangan	Baik	47,7
22	Cisauk	Baik	28,3
23	Sukamulya	Baik	23,9
24	Kelapa Dua	Baik	9,8
25	Sindang Jaya	Baik	39,9
26	Sepatan Timur	Baik	39,1
27	Solear	Baik	20,6
28	Gunung Kaler	Baik	47,4
29	Mekar Baru	Baik	16,4
30	Balaraja	Sedang	0
31	Jayanti	Sedang	0
32	Tigaraksa	Sedang	5,3
33	Jambe	Sedang	7,9
34	Cisoka	Sedang	6,9
35	Kresek	Sedang	0
36	Kronjo	Sedang	0
37	Mauk	Sedang	0
38	Kemiri	Sedang	1
39	Sukadiri	Sedang	2,7
40	Rajeg	Sedang	0
41	Pasar Kemis	Sedang	0
42	Teluknaga	Sedang	5,3
43	Kosambi	Sedang	1,7
44	Pakuhaji	Sedang	0
45	Sepatan	Sedang	0
46	Curug	Sedang	0
47	Cikupa	Sedang	0
48	Panongan	Sedang	0
49	Legok	Sedang	0
50	Pagedangan	Sedang	0
51	Cisauk	Sedang	0

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan	Panjang Jalan
52	Sukamulya	Sedang	0
53	Kelapa Dua	Sedang	0
54	Sindang Jaya	Sedang	0
55	Sepatan Timur	Sedang	0
56	Solear	Sedang	0
57	Gunung Kaler	Sedang	0
58	Mekar Baru	Sedang	0
59	Balaraja	Rusak Ringan	0
60	Jayanti	Rusak Ringan	0
61	Tigaraksa	Rusak Ringan	0
62	Jambe	Rusak Ringan	1
63	Cisoka	Rusak Ringan	2,5
64	Kresek	Rusak Ringan	0
65	Kronjo	Rusak Ringan	0
66	Mauk	Rusak Ringan	0
67	Kemiri	Rusak Ringan	3,3
68	Sukadiri	Rusak Ringan	0
69	Rajeg	Rusak Ringan	0
70	Pasar Kemis	Rusak Ringan	0
71	Teluknaga	Rusak Ringan	0
72	Kosambi	Rusak Ringan	3,4
73	Pakuhaji	Rusak Ringan	0
74	Sepatan	Rusak Ringan	0
75	Curug	Rusak Ringan	0
76	Cikupa	Rusak Ringan	0
77	Panongan	Rusak Ringan	0
78	Legok	Rusak Ringan	0
79	Pagedangan	Rusak Ringan	0
80	Cisauk	Rusak Ringan	0
81	Sukamulya	Rusak Ringan	0
82	Kelapa Dua	Rusak Ringan	0
83	Sindang Jaya	Rusak Ringan	1,3
84	Sepatan Timur	Rusak Ringan	0
85	Solear	Rusak Ringan	0
86	Gunung Kaler	Rusak Ringan	0
87	Mekar Baru	Rusak Ringan	1,5

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan	Panjang Jalan
88	Balaraja	Rusak Berat	1
89	Jayanti	Rusak Berat	0
90	Tigaraksa	Rusak Berat	0
91	Jambe	Rusak Berat	0
92	Cisoka	Rusak Berat	0
93	Kresek	Rusak Berat	0
94	Kronjo	Rusak Berat	0
95	Mauk	Rusak Berat	0
96	Kemiri	Rusak Berat	0
97	Sukadiri	Rusak Berat	0
98	Rajeg	Rusak Berat	0
99	Pasar Kemis	Rusak Berat	0
100	Teluknaga	Rusak Berat	0
101	Kosambi	Rusak Berat	0
102	Pakuhaji	Rusak Berat	0
103	Sepatan	Rusak Berat	0
104	Curug	Rusak Berat	0
105	Cikupa	Rusak Berat	0
106	Panongan	Rusak Berat	0
107	Legok	Rusak Berat	0
108	Pagedangan	Rusak Berat	0
109	Cisauk	Rusak Berat	0
110	Sukamulya	Rusak Berat	0
111	Kelapa Dua	Rusak Berat	0
112	Sindang Jaya	Rusak Berat	0
113	Sepatan Timur	Rusak Berat	0
114	Solear	Rusak Bera	0
115	Gunung Kaler	Rusak Berat	0
116	Mekar Baru	Rusak Berat	0

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang 2023

2. Infrastruktur Air Bersih

Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum,

hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan Provinsi Banten dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Dengan persentase sebesar 98,55 pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dalam pemenuhan air minum layak di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang Selatan. Dengan hasil angka tersebut diketahui hampir semua rumah tangga di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh fasilitas sanitasi yang layak. Upaya pemerintah di masa mendatang adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan layanan rumah tangga terhadap air minum layak secara penuh (100%).

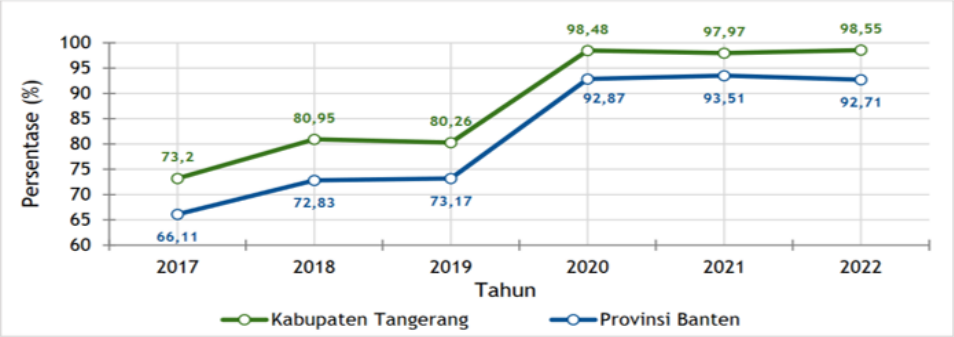
Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses
terhadap layanan Air Minum Layak
menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	39,5	41,93	45,96	75,83	82,01	77,27
Kab Lebak	35,38	44,09	37,97	73,49	73,32	73,27
Kab Tangerang	73,2	80,95	80,26	98,48	97,97	98,55
Kab Serang	59,2	65,73	68,34	89,95	92,33	91,91
Kota Tangerang	78,93	88,64	89,6	98,37	98	95,58
Kota Cilegon	80,85	83,23	88,85	94,98	98,72	99,08
Kota Serang	70,92	71,97	80,96	99,1	98,38	97,61
Kota Tangerang Selatan	77,46	81,85	78,33	99,08	99,22	98,64
Propinsi Banten	66,11	72,83	73,17	92,87	93,51	92,71

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023

Secara grafik data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1

Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Layanan Air Minum Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022.

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2023.

Tabel 4.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama
Untuk Minum Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Sumber Air Minum	Kabupaten Tangerang (%)	Banten (%)
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	72,16	56,82
Ledeng	1,97	2,18
Sumur Bor/ Pompa	22,70	23,21
Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	2,49	10,95
Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	...	6,13
Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	...	0,71
Jumlah	**100**	**100**

Sumber : Data Susenas BPS Tahun 2023

Tabel 4.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama
Untuk Mandi/Cuci dll. Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Sumber Air Minum	Kabupaten Tangerang (%)	Banten (%)
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	1,25	1,15
Ledeng	...	6,09
Sumur Bor/ Pompa	80,43	66,72
Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	4,50	13,69
Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	...	6,09
Air Permukaan, Air Hujan. Lainnya	1,18	1,69
Jumlah	100	100

Sumber : Data Susenas BPS Tahun 2023

Untuk menunjang layanan air bersih serta meningkatkan kawasan permukiman pada tahun 2023, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang telah membangun sarana air bersih sebanyak 462 unit, instalasi pengolahan air yang terbangun sebanyak 2 unit di Palasari dan Cirumpak. Kemudian membangun jalan area pemukiman sebanyak 555 serta membuat Drainase dan MCK sebanyak 197.

Disisi lain terkait kondisi penyediaan air bersih di Kabupaten Tangerang berdasarkan Tempo.Co. Tangerang disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2019 baru 36,8 dari target 40 persen penduduk Kabupaten Tangerang yang terlayani air bersih. Adapun untuk 60 persen dari 3,7 jiwa penduduk kabupaten Tangerang yang belum menikmati air bersih, menurut Rusdi, masuk dalam RPJMD 2019-2023. "Rencana induk SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 5 tahun ke depan 60 persen.

3. Infrastruktur Perumahan

Pertumbuhan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tangerang sangat pesat, dengan banyaknya pembangunan perumahan baru baik yang bersubsidi maupun komersial. Pembangunan ini sering kali tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti akses jalan, air bersih, dan sanitasi. Permukiman informal dan pemukiman kumuh masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Rumah layak huni di Kabupaten Tangerang selalu meningkat dari 2017 menuju 2019. Kemudian angka ini turun dengan pesat menjadi 63,38% pada tahun 2020 sebelum naik kembali pada tahun 2021 dengan angka 71,80%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Tangerang di posisi ketiga persentase rumah layak huni di Provinsi Banten. Turunnya angka persentase pada tahun 2019-2020 diasumsikan terjadi karena adanya perubahan metode pengukuran dan klasifikasi rumah layak huni.

Data kondisi rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat ditempati di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Data Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat ditempati di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Status	Kabupaten Tangerang (%)	Banten (%)
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	91,57	85,67
Kontrak/Sewa	3,65	6,24
Bebas Sewa	4,78	7,73
Dinas/Lainnya	0,00	0,36
Jumlah	**100**	**100**

Sumber : Data Susenas BPS Tahun 2023

Selanjutnya terkait dengan data rumah tangga berdasarkan luas lantai rumah (m2) di kabupaten Tangerang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Data Prosentase rumah berdasarkan luas tanah (m2)
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Luas Tanah (m^2)	Kabupaten Tangerang (%)	Banten (%)
(1)	(2)	(3)
< 50	16,31	21,21
50-99	65,71	54,85
100-149	11,54	16,02
150+	6,44	7,92
Total	**100**	**100**

Sumber : Data Susenas BPS Tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman telah dilakukan Pembangunan rumah hunian baru layak yang dibiayai dari APBD. Adapun data terkait dengan jumlah

hunian baru layak yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data Jumlah Hunian Baru Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah
1	Balaraja	60
2	Jayanti	60
3	Tigaraksa	63
4	Jambe	56
5	Cisoka	60
6	Kresek	60
7	Kronjo	61
8	Mauk	58
9	Kemiri	56
10	Sukadiri	62
11	Rajeg	57
12	Pasar Kemis	55
13	Teluknaga	60
14	Kosambi	56
15	Pakuhaji	57
16	Sepatan	0
17	Curug	0
18	Cikupa	0
19	Panongan	55
20	Legok	0
21	Pagedangan	0
22	Cisauk	0
23	Sukamulya	57
24	Kelapa Dua	0
25	Sindang Jaya	58
26	Sepatan Timur	56
27	Solear	0
28	Gunung Kaler	57
29	Mekar Baru	58
	Kabupaten Tangerang	1.222

Sumber : (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024)

Disisi lain pada tahun 2023 juga telah dilakukan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Program Gebrak Pakumis (PGP). Pembangunan tersebut tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dan pembangunan terbanyak terdapat di Kecamatan Tigaraksa. RTLH yang ada di Kabupaten Tangerang memang masih banyak tersebar, pada 2023 untuk pembedahan RTLH sendiri terdapat 3 bagian yaitu RTLH PGP yang dibangun sebanyak 1.222 unit, RTLH non kawasan sebanyak 87 unit yang tersebar di 20 Kecamatan dan RTLH pasca bencana sebanyak 6 unit di 3 Kecamatan yaitu Gunung Kaler, Keronjo dan Tigaraksa.

4. Infrastruktur Ruang Publik

Kabupaten Tangerang memiliki berbagai ruang publik yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Infrastruktur ruang publik di daerah ini mencakup taman, alun-alun, pusat olah raga, tempat wisata dan fasilitas umum lainnya. Kabupaten Tangerang memiliki beberapa pusat olahraga yang cukup baik, seperti stadion dan lapangan sepak bola yang sering digunakan untuk kegiatan olahraga masyarakat dan kompetisi lokal. Namun, masih ada tantangan dan kebutuhan peningkatan untuk memastikan ruang publik tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Disamping itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam suatu wilayah. Amanat Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luasan ruang terbuka hijau adalah minimal 30 persen dari luas wilayah, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Rasio RTH per satuan wilayah beserta hak-haknya memperlihatkan seberapa besar pemerintah dapat memenuhi minimal kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kabupaten Tangerang sendiri saat ini telah memenuhi sekitar 17,05% rasio

ruang terbuka pada tahun 2021. Angka ini meningkat dari 3 tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13% pada tahun 2018.

Kabupaten Tangerang perlu meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakat sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah. Beberapa taman di Kabupaten Tangerang, seperti Taman Potret dan Taman Kota 1 BSD, dalam kondisi yang cukup baik dan menjadi tempat favorit bagi warga untuk bersantai dan berolahraga. Taman-taman ini dilengkapi dengan fasilitas seperti area bermain anak, jogging track, dan tempat duduk. Namun demikian meskipun ada beberapa taman yang terawat dengan baik, jumlah ruang terbuka hijau masih kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang.

Sedangkan kondisi infrastruktur pariwisata di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2017- 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10
Data jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur
pada Hotel Bintang di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2017	13	1.260	1.772
2018	19	1.841	2.605
2019	19	2.411	3.474
2020	18	468	3.508
2021	18	2.232	3.315
2022	20	2.007	3.040
2023	21	2.786	4.461

Sumber: BPS, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Selanjutnya terkait dengan ruang publik dalam bentuk rumah makan/restoran di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Data Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tangerang
Tahun 2023

Tahun	Kabupaten Tangerang	Banten	%
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	907	2.097	43,3%
2021	960	2.400	40,0%
2022	1.020	4.811	21,2%
2023	1.020	10.170	10,0%

Sumber: BPS, Provinsi Banten Dalam Angka 2024

Selanjutnya Kabupaten Tangerang infrastruktur ruang publik di tempat-tempat wisata yang sangat penting untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan pengunjung, serta untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, seperti daerah lain, Kabupaten Tangerang juga menghadapi tantangan dalam hal pemeliharaan dan peningkatan fasilitas wisata. Adapun data infrastruktur ruang publik berupa tempat-tempat wisata di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2023

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Obyek Daya Tarik
1.	Wisata Ziarah Jaga Laut	Kec. Kronjo	Makam Kramat
2.	Wisata Ziarah Makom Solear	Kec. Solear	Makam Kramat
3.	Hutan Lindung Solear	Kec. Solear	Hutan Lindung
4.	Puspem Kab.Tangerang	Kec. Tigaraksa	Danau dan Hutan Lindung
5.	Wisata Mardi Grass	Kec. Panongan	Kuliner
6.	Seni Kriya Bambu	Kec. Legok	Kerajinan Tangan
7.	Desa Embung Serdang Wetan	Kec. Legok	Desa Wisata
8.	Agro Wisata Rambutan Parakan	Kec. Legok	Wisata Buah-buahan
9.	Wisata Ziarah Aria Wangsakara	Kec. Pagedangan	Makam Kramat
10.	Telaga Gading Serpong	Kec. Pagedangan	Wisata Air

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Obyek Daya Tarik
11.	Situs Ketapang Mauk Gajah Purba	Kec. Mauk	Wisata Prasejarah
12.	Edukasi Dirgantara	Kec. Curug	Aero Wisata
13.	Wisata Tanjung Pasir	Kec. Teluknaga	Wisata Pantai
14.	Wisata Hutan Mangrove Tj Pasir	Kec. Teluknaga	Wisata Mangrove
15.	Wisata Hutan Mangrove Ds.Muara	Kec. Teluknaga	Wisata Mangrove
16.	Wisata Teluknaga Mas	Kec.Teluknaga	Wisata Edukasi
17.	Kerajinan Batu Hias	Kec. Curug	Batu Hias
18.	Desa Wisata Kandawati	Kec. Gunung Kaler	Wisata Makom dan Alam
19.	Tebing Koja	Kec. Solear	Wisata Alam

Sumber: Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024

5. Infrastruktur Pelayanan Publik

Ketersediaan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Tangerang memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan warganya. Meskipun ada berbagai tantangan seperti aksesibilitas, kualitas layanan, dan efisiensi, pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan. Dengan perhatian yang berkelanjutan dan inovasi dalam pelayanan, diharapkan kualitas infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Tangerang dapat terus meningkat, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tangerang mencakup berbagai jenjang pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan akses pendidikan di beberapa daerah terpencil. Jumlah infrastruktur Sekolah Dasar di kabupaten Tangerang sejak tahun 2029-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Data Infrstruktur Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Sekolah Dasar	
	Negeri	Swasta
2019/2020	759	255
2020/2021	759	260
2021/2022	758	267
2022/2023	759	279
2023/2024	743	280

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Selanjutnya data infrastruktur pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2019-2024 di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14
Data insfrastruktur Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	
	Negeri	Swasta
2019/2020	89	345
2020/2021	89	358
2021/2022	91	359
2022/2023	91	372
2023/2024	92	366

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Adapun data infrastruktur pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2019-2024 di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Data insfrastruktur Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Atas	
	Negeri	Swasta
2019/2020	30	139
2020/2021	30	140
2021/2022	32	142
2022/2023	32	145
2023/2024	32	150

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Adapun data infrastruktur pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2019-2024 di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Data insfrastruktur Sekolah Menengah Kejuruan
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	
	Negeri	Swasta
2019/2020	12	188
2020/2021	12	188
2021/2022	12	190
2022/2023	12	190
2023/2024	12	190

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Data infrastruktur kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun demikian, dengan jumlah

penduduk yang terus meningkat, fasilitas kesehatan sering kali kewalahan dan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Adapun data insfrastruktur Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Data Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Tahun	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Total
	Dikelola Pemkab	Dikelola Swasta	Dikelola Pemkab	Dikelola Swasta	
2019	3	17	-	5	25
2020	3	17	-	5	25
2021	3	18	-	6	27
2022	3	19	-	5	27
2023	4	19	-	5	28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Selanjutnya data infrastruktur layanan kesehatan pada tingkat Puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.18 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Data Puskesmas di Kabupaten Tangerang
Tahun 2023

No	Nama Wilayah	Jenis Puskesmas		
		Rawat Inap	Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu
1	Balaraja	1	1	1
2	Jayanti	0	1	0
3	Tigaraksa	0	2	3
4	Jambe	0	1	1
5	Cisoka	1	0	0
6	Kresek	1	0	1
7	Kronjo	1	0	0
8	Mauk	1	0	2
9	Kemiri	0	1	2
10	Sukadiri	0	1	3
11	Rajeg	0	2	4
12	Pasar Kemis	0	1	0
13	Teluknaga	0	2	2
14	Kosambi	0	2	1
15	Pakuhaji	0	2	1
16	Sepatan	1	1	0
17	Curug	1	1	2
18	Cikupa	0	2	2
19	Panongan	0	1	2
20	Legok	0	3	2
21	Pagedangan	0	1	2
22	Cisauk	0	2	2
23	Sukamulya	0	1	1
24	Kelapa Dua	0	4	0
25	Sindang Jaya	0	1	3
26	Sepatan Timur	0	1	1
27	Solear	0	1	2
28	Gunung Kaler	0	1	2
29	Mekar Baru	0	1	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Selain insfrastruktur pelayanan publik bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kabupaten Tangerang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administratif baik terkait dengan layanan kependudukan dan catatan sipil, layanan perijinan usaha, maupun layanan publik digital.

Lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait seperti kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam satu tempat Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima.

6. Infrastruktur Irigasi

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah pertanian yang cukup luas, sangat bergantung pada sistem irigasi yang efektif untuk mendukung sektor pertaniannya. Infrastruktur irigasi memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan air untuk sawah, perkebunan, dan ladang. Meskipun telah ada upaya peningkatan dan perbaikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa sistem irigasi berfungsi dengan baik dan efisien.

Infrastruktur jaringan irigasi ini mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran-saluran dari sumber air utama seperti sungai dan waduk ke lahan pertanian. Beberapa saluran irigasi utama termasuk Saluran Induk Cidurian dan Saluran Induk Cisadane. Kondisi saluran-saluran irigasi utama umumnya dalam kondisi yang cukup baik, namun beberapa saluran sekunder dan tersier mengalami kerusakan atau sedimentasi yang mengurangi efisiensinya. Kerusakan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya perawatan rutin dan faktor alam seperti banjir dan erosi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, definisi irigasi disebutkan sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan

pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M.2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi daerah. Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menjaga kualitas sistem irigasi daerah. Pada tahun 2020, tercatat hanya ada 6,05% persentase irigasi di Kabupaten Tangerang yang berada dalam kondisi baik. Persentase ini kemudian meningkat pesat menjadi 27,7% pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 69,94 pada tahun 2022.

Data infrastruktur irigasi di Kabupaten Tangerang yang dalam kondisi baik sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Data Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	6,05%	27,70%	69,94%

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

7. Infrastruktur Perhubungan

Infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang merupakan elemen vital dalam mendukung mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti kemacetan, kerusakan jalan, keterbatasan layanan transportasi umum, dan pemeliharaan

fasilitas penunjang, pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan. Dengan perencanaan yang baik, alokasi sumber daya yang tepat, dan kolaborasi antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat, diharapkan sistem perhubungan di Kabupaten Tangerang dapat berfungsi lebih efisien, aman, dan nyaman untuk seluruh warganya.

Kabupaten Tangerang memiliki sistem transportasi umum yang cukup baik, termasuk bus, angkutan kota, dan kereta komuter. Stasiun-stasiun kereta seperti Stasiun Tangerang, Stasiun Serpong, dan Stasiun Cisauk merupakan bagian dari jaringan KRL Jabodetabek yang menghubungkan daerah ini dengan Jakarta dan sekitarnya.

Disisi lain infrastruktur penunjang seperti jembatan, flyover, dan underpass sangat penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Tangerang. Beberapa jembatan utama, seperti Jembatan Cisadane, berfungsi sebagai penghubung vital antara berbagai wilayah.

Data transportasi umum berdasarkan jenis kendaraan di Kabupaten tangerang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel 4.20
Transportasi umum berdasarkan jenis kendaraan
Di Kabupaten Tangerang 2021-2023

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
2021	189.647	1.648	52.844	1.203.050
2022	199.489	1.623	54.044	1.199.905
2023	217.751	1.736	57.595	1.306.903

Sumber: BPS, Provinsi Banten Dalam Angkas 2024.

Selain itu Kabupaten Tangerang juga memiliki infrastruktur perhubungan dalam bentuk Bandar Udara Soekarno Hatta. Data bandara dapat dilihat pada Tabel 4.21 sebagai berikut:

Tabel 4.21
Data Insfrastruktur Bandara di Kabupaten Tangerang

Bandara Udara	Jumlah Pelabuhan Udara
Soekarno Hatta	1
Budiarto	1
Kabupaten Tangerang	**2**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 2024

8. Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup

Infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan infrastruktur yang memadai dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan Kabupaten Tangerang dapat menjadi daerah yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi semakin kompleks. Untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 4.22

Daftar Tempat Pengolahan Sampah di Kabupeten Tangerang Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH TPST	JUMLAH TPSA
1	Balaraja	0	1	0
2	Jayanti	0	1	0
3	Tigaraksa	0	8	0
4	Jambe	0	0	0
5	Cisoka	0	1	0
6	Kresek	0	0	0
7	Kronjo	0	2	0
8	Mauk	0	1	1
9	Kemiri	0	0	0
10	Sukadiri	0	1	0
11	Rajeg	0	1	0
12	Pasar Kemis	0	0	0
13	Teluknaga	0	0	0
14	Kosambi	0	1	0
15	Pakuhaji	0	2	0
16	Sepatan	0	0	0
17	Curug	0	1	0
18	Cikupa	0	2	0
19	Panongan	0	1	0
20	Legok	0	1	0
21	Pagedangan	0	1	0
22	Cisauk	0	3	0
23	Sukamulya	0	0	0
24	Kelapa Dua	0	1	0
25	Sindang Jaya	0	1	0
26	Sepatan Timur	0	0	0
27	Solear	0	1	0
28	Gunung Kaler	0	0	0
29	Mekar Baru	0	0	0

sumber : (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024)

Beberapa masalah lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Tangerang antara lain: (1) Polusi Udara: Emisi kendaraan bermotor dan industri merupakan sumber utama pencemaran udara yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat; (2) Pengelolaan Sampah: Peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan industri menimbulkan tantangan dalam pengelolaannya; (3) Kerusakan Ekosistem: Perubahan tata guna lahan dan alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan perumahan dan industri berdampak pada kerusakan ekosistem alami; (4) Kualitas Air: Pencemaran air sungai dan sumber air lainnya

akibat limbah domestik dan industri; dan (5) Banjir: Perubahan iklim dan tata kelola drainase yang kurang baik menyebabkan banjir di beberapa wilayah.

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.23
Hasil Uji Validitas

Dimensi	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Dimensi Jalan dan Jembatan			
ID.1	0,353	0,098	Valid
ID.2	0,468	0,098	Valid
ID.3	0,598	0,098	Valid
ID.4	0,558	0,098	Valid
ID.5	0,620	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Air Bersih			
ID.1	0,396	0,098	Valid
ID.2	0,637	0,098	Valid
ID.3	0,708	0,098	Valid
ID.4	0,661	0,098	Valid
ID.5	0,727	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Permukiman			
ID.1	0,512	0,098	Valid
ID.2	0,685	0,098	Valid
ID.3	0,682	0,098	Valid
ID.4	0,674	0,098	Valid
ID.5	0,694	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Ruang Publik			
ID.1	0,555	0,098	Valid
ID.2	0,720	0,098	Valid
ID.3	0,736	0,098	Valid
ID.4	0,766	0,098	Valid
ID.5	0,742	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Pelayanan Publik			
ID.1	0,353	0,098	Valid
ID.2	0,468	0,098	Valid
ID.3	0,598	0,098	Valid
ID.4	0,558	0,098	Valid
ID.5	0,620	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Irigasi			
ID.1	0,396	0,098	Valid

Dimensi	r Hitung	r Tabel	Keterangan
ID.2	0,637	0,098	Valid
ID.3	0,708	0,098	Valid
ID.4	0,661	0,098	Valid
ID.5	0,727	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan			
ID.1	0,512	0,098	Valid
ID.2	0,685	0,098	Valid
ID.3	0,682	0,098	Valid
ID.4	0,674	0,098	Valid
ID.5	0,694	0,098	Valid
Dimensi Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup			
ID.1	0,555	0,098	Valid
ID.2	0,720	0,098	Valid
ID.3	0,736	0,098	Valid
ID.4	0,766	0,098	Valid
ID.5	0,742	0,098	Valid

Sumber : data diolah SPSS ver 23

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan skor validitas dapat dikatakan valid karena telah memenuhi kriteria pengujian signifikansi dan lebih besar dari r tabel 0,098. Adapun perolehan nilai validitas rata-rata tertinggi pada dimensi Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 0,704 dan untuk nilai validitas terendah pada dimensi infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Pelayanan Publik denan nilai validitas rata-rata sebesar 0,520. Dasar pengambilan keputusan yang dapat ditentukan yakni apabila nilai rhitung item/dimensi lebih besar dari rtabel maka menunjukkan bahwa instrumen tersebut sangat valid.

Tabel 4.24

Hasil Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	194	76.4
	Excluded[a]	60	23.6
	Total	254	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

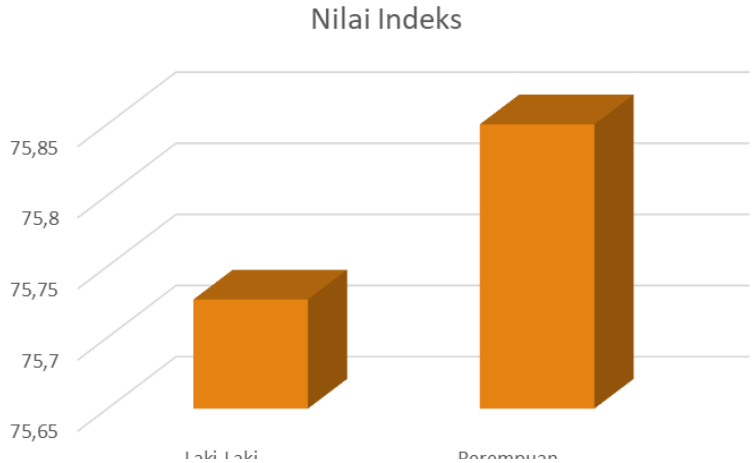
Cronbach's Alpha	N of Items
.751	41

Sumber : data diolah SPSS ver 23

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa total skor dari 8 dimensi sebesar 0,751 dan reliabel dengan memenuhi uji signifikansi lebih besar 0,6. Dasar pengambilan keputusan yang dapat ditentukan yakni apabila item/dimensi semakin mendekati menunjukkan bahwa instrumen tersebut sangat reliabel sehingga diharapkan pengujian terhadap item/dimensi dapat mendekati skor 1,0 dan minimum adalah 0,6.

C. Karakteristik Responden

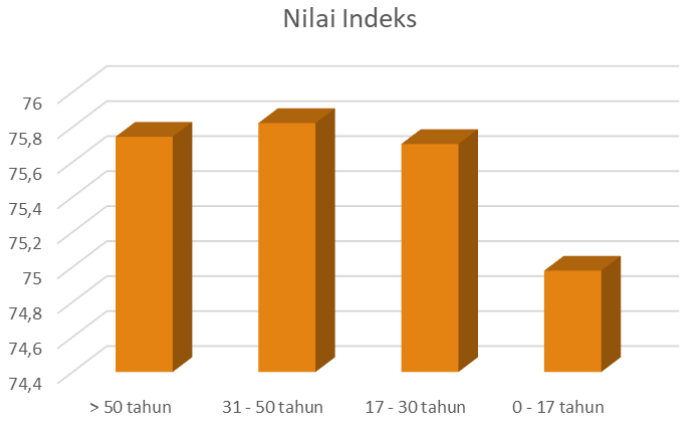
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 4.2
Hasil Nilai Indeks Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Penyajian data dari profil responden data hasil dari pengumpulan lapangan yang mengkausalitaskan bahwasanya jumlah responden perempuan masih memiliki prosentase tertinggi sebesar 75,85% terhadap indeks kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Hal ini mendefinisikan jenis kelamin perempuan memberikan kontribusi terbesar dari nilai atas persepsi kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang.

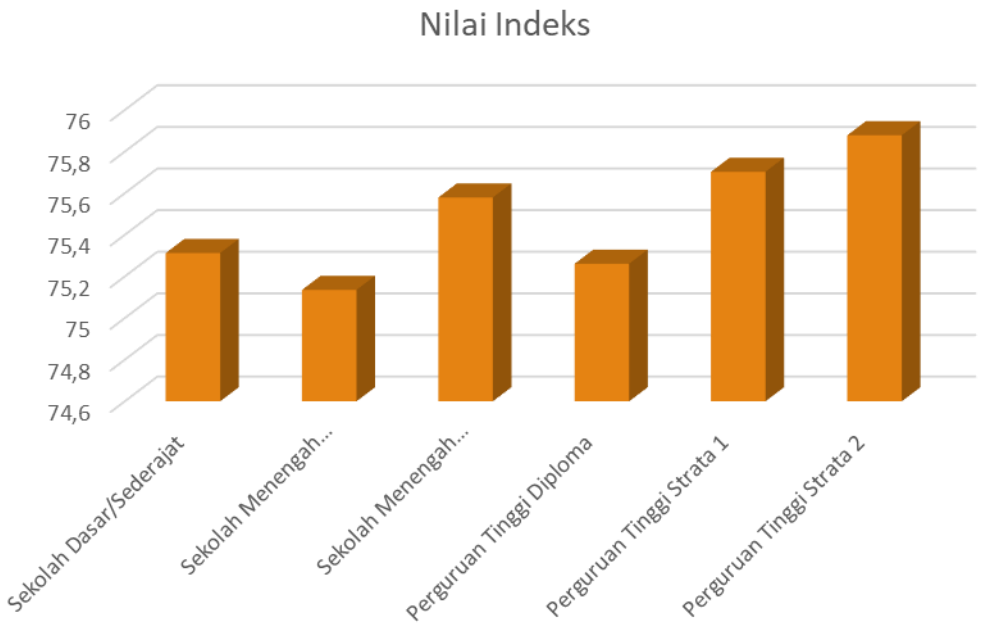
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia



Gambar 4.3
Hasil Nilai Indeks Berdasarkan Usia
Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Penyajian data dari profil responden berdasarkan usia diatas merepresentasikan bahwasanya dalam pengumpulan data yang disampaikan merepresentasikan Nilai IKLI Kabupaten Tangerang pada rentang usia 31-50 tahun sebesar 75,82 dan merupakan memiliki nilai tertinggi diantara rentang usia lainnya. Hal ini mendefinisikan rentang usia 31-50 tahun memberikan kontribusi terbesar dari nilai atas persepsi kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 4.4

Hasil Nilai Indeks Berdasarkan Pendidikan

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Adapun dalam pengumpulan data yang dihimpun, merepresentasikan lulusan pendidikan Perguruan Tinggi Strata 2 memiliki dominasi nilai tertinggi sebesar 75,88 dalam menjawab Nilai Kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Hal ini mendefinisikan bahwasanya Perguruan Tinggi Strata 2 memberikan kontribusi terbesar dari nilai atas persepsi kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Tangerang.

4. Analisis data Kuantitatif

4.4.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Tangerang

Untuk mengetahui akumulasi skor IKLI Kabupaten Tangerang tahun 2023 yang dihimpun dari 400 responden yang tersebar di 29 Kecamatan disajikan dengan menggunakan metode perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25

Perhitungan Nilai Indeks IKLI Capaian Kabupaten Tangerang 2024

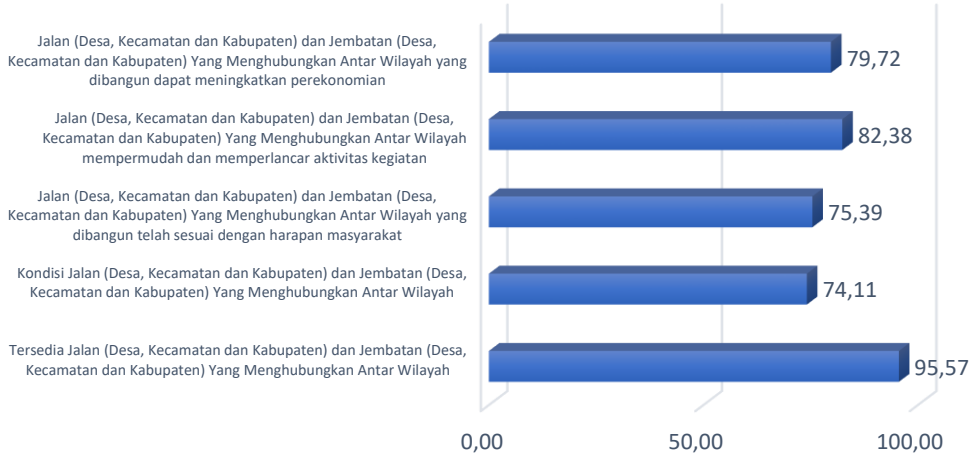
Bobot Nilai Tertimbang	0,025
IKLI	3,022625
Konversi IKLI	75,56563
Predikat Kepuasan Layanan Infrastruktur	C

Nilai Interval Konversi (NIK)	Kepuasan Lay Infrastruktur	Predikat
25 - 64,99	D	Tidak Baik
65 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 – 100	A	Sangat Baik

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

4.4.2 Capaian IKLI Pada Masing-Masing Indikator/Variabel

Infrastruktur Jalan dan Jembatan



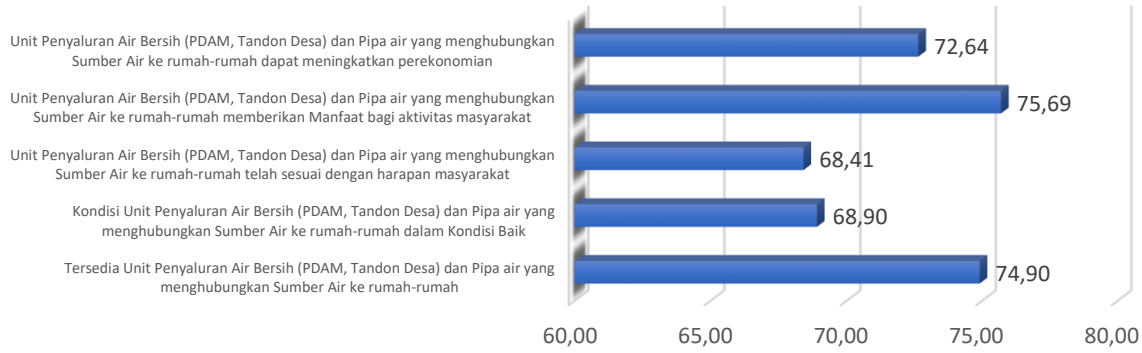
Gambar 4.5 Nilai Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat direpresentasikan bahwasanya aspek ketersediaan pada unsur Ketersediaan jalan dan jembatan di Kabupaten Tangerang sangat baik, mencerminkan bahwa infrastruktur penghubung antar wilayah sudah cukup memadai.dengan skor yang paling tinggi sebesar 95,57. Kemudian, untuk aspek kualitas unsur kondisi jalan dan jembatan (desa, kecamatan dan kabupaten) paling rendah dengan nilai skor sebesar 74,11. Pada aspek kesesuaian unsur pembangunan jalan dan jembatan cukup memenuhi harapan masyarakat meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dengan skor nilai 75,39. Pada aspek Pemanfaatan unsur Infrastruktur ini sangat membantu dalam memperlancar aktivitas Masyarakat dengan nilai skor 82,38. Hal ini selaras dengan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang untuk tahun 2022 difokuskan pada peningkatan jaringan jalan dan drainase. Pemerintah daerah menekankan pentingnya proyek-proyek ini dalam meningkatkan konektivitas dan pengelolaan sumber daya air (Tim Humas Metro Banten, 2022). Adapun hasil dari survey yang telah didapat

menyelaraskan pada data terhadap kondisi Panjang jalan kabupaten Dimana pada tahun 2023 Kabupaten Tangerang memiliki kondisi jalan kurang baik sebesar 14,5% yang tersebar pada beberapa kecamatan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, Kabupaten Tangerang dapat memastikan bahwa konektivitas antar wilayah tetap terjaga, yang pada akhirnya akan meningkatkan mobilitas dan perekonomian lokal. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan guna memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat.

Infrastruktur Air Bersih



Gambar 4.6 Nilai Indeks Infrastruktur Air Bersih

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil survei kepuasan infrastruktur, terdapat beberapa poin penting yang menunjukkan capaian dan efektivitas dari infrastruktur air bersih ini.

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah tersedianya unit penyaluran air bersih, seperti PDAM Tandon Desa, dan pipa air yang menghubungkan sumber air ke rumah-rumah dengan nilai kepuasan mencapai 74,90. Hal ini selaras terhadap "Ketersediaan air bersih di Kabupaten Tangerang masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Menurut data dari Dinas Pekerjaan

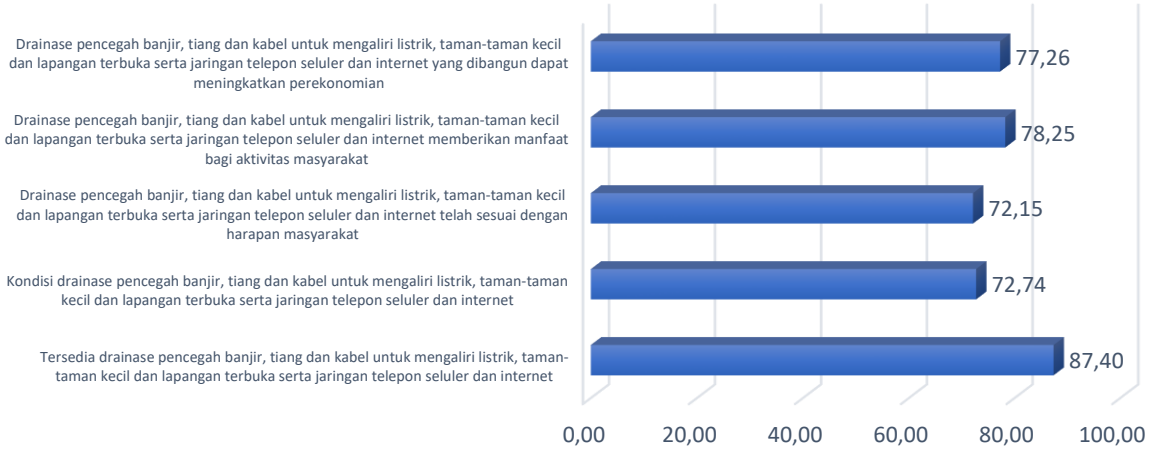
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tangerang, sekitar 60% penduduk di daerah pedesaan masih belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber air bersih yang berkelanjutan." (Dinas PUPR Kabupaten Tangerang, 2023). Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan yang cukup untuk mendistribusikan air bersih kepada Masyarakat.

Namun, kondisi unit penyaluran air bersih dan pipa air yang menghubungkan sumber air ke rumah-rumah masih memerlukan perhatian lebih lanjut, dengan nilai 68,90. Hal ini diperkuat dengan Kondisi infrastruktur air bersih di Kabupaten Tangerang bervariasi. Beberapa wilayah memiliki jaringan pipa yang sudah tua dan memerlukan peremajaan. Selain itu, pencemaran air juga menjadi masalah utama yang mempengaruhi kualitas air bersih yang didistribusikan kepada Masyarakat (Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2023). Meskipun demikian, unit penyaluran air bersih yang ada telah dinilai sesuai dengan harapan masyarakat, dengan nilai 68,41.

Infrastruktur air bersih ini memberikan manfaat yang signifikan bagi aktivitas sehari-hari masyarakat, dengan nilai manfaat sebesar 75,69. Mereduksi hal tersebut, "Pemanfaatan air bersih di Kabupaten Tangerang telah meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur baru. Namun, kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi air masih perlu ditingkatkan. Program-program edukasi dan kampanye penggunaan air secara bijak telah dijalankan oleh pemerintah daerah" (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang, 2023). Selain itu, ketersediaan air bersih juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal, dengan nilai 72,64. "Peningkatan akses terhadap air bersih di Kabupaten Tangerang berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan tersedianya air bersih yang memadai, produktivitas masyarakat meningkat dan sektor-sektor seperti pertanian, industri kecil, dan pariwisata mengalami perkembangan yang signifikan" (Laporan Ekonomi Kabupaten Tangerang, 2023).

Dengan adanya infrastruktur air bersih yang baik, Kabupaten Tangerang dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih terpenuhi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas unit penyaluran air bersih serta memastikan bahwa infrastruktur ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Infrastruktur Permukiman



Gambar 4.7 Nilai Indeks Infrastruktur Pemukiman

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat direpresentasikan bahwasanya unsur Tersedia drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet memiliki nilai skor yang paling tinggi sebesar 87,40. Hal ini selaras dengan hasil penelitian ini mengidentifikasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) non alami di perkotaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas, indah, nyaman, sehat, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas RTH (Armijon, Armijon, 2019). Kemudian, untuk unsur paling rendah ada pada Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil

dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet telah sesuai dengan harapan masyarakat dengan nilai skor sebesar 72,15. Dengan mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur permukiman. Pada tahun 2023, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) membangun sarana air bersih, instalasi pengolahan air, jalan area pemukiman, serta drainase dan MCK. Selain itu, program Gebrak Pakumis (PGP) berhasil membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai kecamatan. RTLH dibangun baik dalam kawasan maupun pasca bencana (Redaksi Pelita Tangerang, 2024).

Infrastruktur Ruang Publik



Gambar 4.8 Nilai Indeks Infrastruktur Ruang Publik

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat direpresentasikan bahwasanya unsur Tersedia Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan memiliki nilai skor yang paling tinggi sebesar 76,18. Hal ini sejalan dengan data Ketersediaan ruang publik di Kabupaten Tangerang terus ditingkatkan melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, pemerintah daerah telah merencanakan penambahan sejumlah taman dan fasilitas umum baru (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2022). Kemudian, untuk

unsur paling rendah ada pada Kondisi Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross Untuk Penyeberangan Jalan Dalam Kondisi Baik dengan nilai skor sebesar 68,21. Tentunya gambaran kondisi ini sesuai dengan "Meski demikian, beberapa ruang publik masih memerlukan perawatan dan peningkatan kualitas, terutama di daerah pinggiran yang masih minim fasilitas" (Jurnal Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2021). Adapun pada dimensi pemanfaatan memiliki skor nilai sebesar 73,82. Dengan pemanfaatan ruang publik juga sering digunakan sebagai lokasi event-event besar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti festival budaya dan pameran" (Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2022). Pada aspek kesesuaian memilki skor nilai sebesar 68,60 yang selaras pada pendapat Tim Pemantauan Ruang Publik Kabupaten Tangerang "namun, ada beberapa ruang publik yang perlu penyesuaian lebih lanjut agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas" (Laporan Pemantauan Inklusivitas Ruang Publik, 2021). Kemudian pada aspek peningkatan terhadap perekonomian memilki nilai skor sebesar 73,52 yang selaras terhadap "Infrastruktur ruang publik berperan signifikan dalam peningkatan perekonomian lokal. Keberadaan ruang publik yang menarik dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah" (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2022).

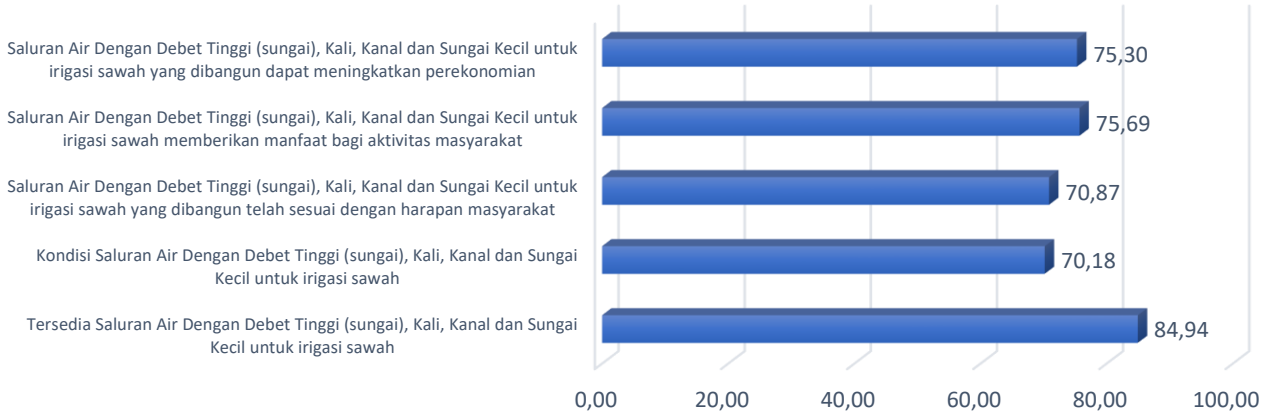
Infrastruktur Pelayanan Publik



Gambar 4.9 Nilai Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat direpresentasikan pada aspek ketersediaan dengan unsur Tersedia sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) memiliki nilai skor yang paling tinggi sebesar 93,70. Hal ini selaras pula dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun MPP. MPP di Kabupaten Tangerang akan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan administrative (Admin Web Terpadu, 2024). Kemudian, untuk dimensi kesesuaian pada unsur paling rendah adalah Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat dengan nilai skor sebesar 75,69. Adapun penguat dari survey tersebut terdapat data jumlah sekolah dasar sampai atas dengan swasta dan negeri yang tidak merata pada sejumlah kecamatan. Kemudian pada aspek pemanfaatan, kondisi dan peningkatan terhadap perekenomian masing-masing memiliki nilai skor 79,82, 77,56 dan 79,72 dengan diperkuat dari data Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, (2024) bahwasanya sarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Tangerang belum optimal dengan mengindikasikan jumlah rumah sakit yang dikelola pemerintah lebih minim dibanding rumah sakit yang dikelola pihak swasta, hal ini tentunya berdampak pula pada sisi pemanfaatan infrastruktur tersebut serta kondisi pemeliharaan fasilitas dan peningkatan terhadap perekonomian daerah pun kurang signifikan terasa.

Infrastruktur Irigasi

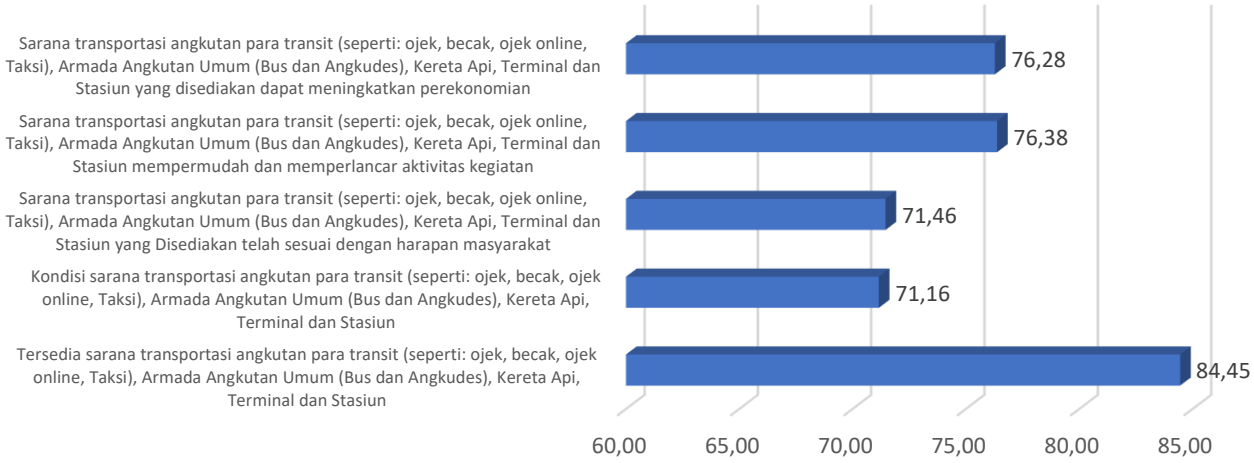


Gambar 4.10 Nilai Indeks Infrastruktur Irigasi

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat direpresentasikan pada aspek ketersediaan melalui unsur Tersedia Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah memiliki nilai skor yang paling tinggi sebesar 84,94. Kemudian, untuk aspek kondisi merupakan nilai yang paling rendah dengan unsur Kondisi Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah dengan nilai skor sebesar 70,18. Lebih lanjut, pada aspek pemanfaatan, kesesuaian dan penignkatan terhadap perekonomian memiliki nilai skor masing-masing sebesar 75,69, 70,87 dan 75,30 dengan data dukung saluran irigasi memiliki kontribusi yang menurun terhadap perekonomian daerah dari tahun sebelumnya dengan merepresentasikan nilai produksi sawah dan waduk terhadap perikanan semakin menurun (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024).

Infrastruktur Sarana dan prasarana perhubungan



Gambar 4.11 NIlai Indeks Infrastruktur Sarana dan prasarana perhubungan

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Berdasarkan data hasil survey responden diatas merepresentasikan pada aspek ketersediaan dengan unsur Tersedia sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun memiliki nilai skor yang paling tinggi sebesar 84,45. Kemudian, untuk unsur paling rendah ada pada aspek Kondisi sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun dengan nilai skor sebesar 71,16. Adapun aspek kesesuaian, peningkatan terhadap perekonomian dan pemanfaatan memiliki nilai skor masing-masing sebesar 76,38, 76,28 dan 71,46. Hal ini pun selaras pada ketersediaan bandara internasional Soekarno Hatta dengan jam penerbangan tinggi, sebaliknya kondisi dermaga yang masih minim terhadap pemanfaatan dan peningkatan terhadap perekonomian yang masih stagnan (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024).

Infrastruktur Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup



Gambar 4.12 Nilai Indeks Infrastruktur Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

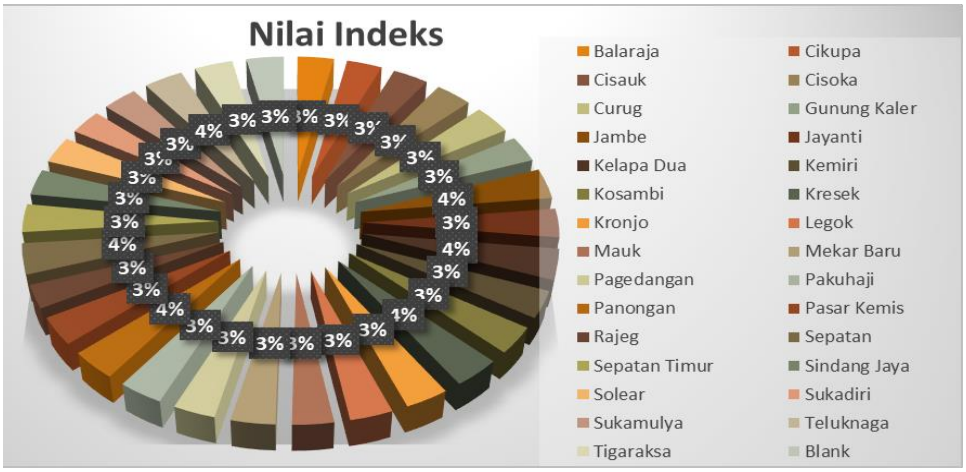
Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat merepresentasikan pada aspek ketersediaan melalui unsur Tersedia Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) memiliki nilai skor yang paling tinggi sebesar 80,02. Kemudian, untuk aspek paling rendah ada pada Kondisi Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dengan nilai skor sebesar 65,94. Adapun pada aspek pemanfaatan, peningkatan terhadap perekonomian dan kesesuaian masing-masing memiliki nilai skor 71,56, 71,36 dan 66,93 dengan data dukung lapangan usaha pada sektor sampah, daur ulang dan limbah menurun dari tahun sebelumnya sehingga mengindikasikan kurangnya pengaruh terhadap peningkatan perekonomian. Sedangkan, jumlah volume sampah yang tertangani cenderung menurun dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan kondisi, pemanfaatan dan kesesuaian tidak selaras terhadap ketersediaan tempat pembuangan sampah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024).

5. Capaian IKLI Per Kecamatan

Tabel 4.26
Capaian Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Per Kecamatan

Kecamatan	Nilai Indeks
Balaraja	3
Cikupa	2,92
Cisauk	2,94
Cisoka	3,04
Curug	3,17
Gunung Kaler	2,88
Jambe	3,32
Jayanti	3,15
Kelapa Dua	3,37
Kemiri	3,01
Kosambi	3,01
Kresek	3,27
Kronjo	3,02
Legok	2,98
Mauk	2,87
Mekar Baru	3,06
Pagedangan	2,91
Pakuhaji	3,07
Panongan	3,22
Pasar Kemis	3,08
Rajeg	2,58
Sepatan	3,38
Sepatan Timur	3,08
Sindang Jaya	2,84
Solear	2,94
Sukadiri	2,72
Sukamulya	2,9
Teluknaga	3,25
Tigaraksa	3,18
Blank	3,08

Sumber : hasil survey kuisioner 2024



Gambar 4.13
Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Per Kecamatan

Sumber : hasil survey kuisioner 2024

Berdasarkan data hasil survey responden diatas dapat direpresentasikan bahwasanya Kecamatan Rajeg memiliki nilai skor yang paling rendah sebesar 2,58. Kondisi ini diperkuat dengan gambaran secara utuh dari sisi pelayanan publik yang belum optimal Infrastruktur di Kecamatan Rajeg, Tangerang, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan yang mempengaruhi kualitas hidup dan pembangunan masyarakatnya antara lain

Transportasi: Jaringan transportasi di Kecamatan Rajeg terbatas dan mengalami kekurangan dalam hal jalan yang baik dan aksesibilitas yang memadai. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tangerang, hanya sekitar 60% dari total panjang jalan di kecamatan ini yang teraspal dan memenuhi standar, sementara sisanya masih berupa jalan tanah atau rusak.

Sarana Kesehatan: Infrastruktur kesehatan di Rajeg juga belum merata dan memadai. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, terdapat kekurangan fasilitas kesehatan penting seperti puskesmas dan rumah sakit yang menyebabkan akses pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terbatas.

Pendidikan: Sektor pendidikan di kecamatan ini juga menghadapi tantangan serupa. Data dari Dinas Pendidikan Tangerang menunjukkan bahwa rasio siswa per guru di beberapa sekolah masih tinggi, menandakan kebutuhan akan lebih banyak sarana pendidikan yang memadai.

Infrastruktur Air Bersih: Akses terhadap air bersih di beberapa bagian Kecamatan Rajeg masih terbatas. Menurut survei yang dilakukan oleh LSM lokal pada tahun lalu, sekitar 30% rumah tangga di kecamatan ini mengalami masalah dalam mendapatkan pasokan air bersih yang layak(Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024).

Kemudian, untuk unsur paling tinggi ada pada Kecamatan Kelapa Dua dengan nilai skor sebesar 3,37. Kecamatan Kelapa Dua, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Curug pada tahun 2007, memiliki beberapa faktor yang berkontribusi pada pemertahanan kualitas infrastruktur:

Peran Kota Terencana : Di kecamatan ini terdapat dua kota terencana atau kota mandiri ternama: Lippo Village (Lippo Group) dan Gading Serpong (Summarecon Agung dan Paramount Land). Kehadiran kota-kota ini telah menjadi perintis perumahan di Kelapa Dua dan memperhatikan aspek infrastruktur. Pengembangan Perumahan

Saat ini, perkembangan perumahan di Kecamatan Kelapa Dua sangat pesat. Beberapa perumahan seperti Villa Rizki Ilhami, Perum Dasana Indah, Permata Medang, dan Perum Kelapa Dua turut memengaruhi kualitas infrastruktur di wilayah ini.

Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas perumahan serta jaringan jalan dan drainase menjadi kunci dalam mempertahankan kualitas infrastruktur (Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2024).

Kolaborasi Pembangunan : Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Kecamatan Kelapa Dua mendorong pembangunan kolaboratif dengan

fokus pada infrastruktur. Usulan menciptakan kampung tematik dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non-formal menjadi bagian dari prioritas pembangunan(Bappeda, 2024).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) tahun 2024 memiliki posisi strategis bagi pemerintah Kabupaten Tangerang. Kajian ini tidak hanya menggambarkan kondisi kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ilmiah bagi pengkajian infrastruktur daerah. Kabupaten Tangerang memiliki Skor IKLI dengan nilai indeks 3,03 atau "kurang baik" dengan kinerja kategori 75,87. Dari delapan indikator yang diukur, indikator dengan skor tertinggi adalah jalan dan jembatan (3,26), sementara indikator dengan skor terendah adalah sarana-prasarana pengelolaan sampah (2,85). Dari 29 kecamatan di Tangerang, terdapat 14 kecamatan dengan skor IKLI di atas rata-rata kabupaten, dan 15 kecamatan di bawah rata-rata. Kecamatan dengan skor IKLI tertinggi adalah Kecamatan Sepatan (3,38), sementara yang terendah adalah Kecamatan Rajeg (2,58). Aspek dengan skor tertinggi adalah ketersediaan fisik (3,39), yang menunjukkan eksistensi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, aspek dengan skor terendah adalah kualitas fisik (2,84), yang menunjukkan perlunya peningkatan kondisi infrastruktur yang ada.

B. Rekomendasi Strategi

Berdasarkan simpulan di atas, maka tim merekomendasi untuk meningkatkan kualitas infrastrukturnya Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Infrastruktur Air Bersih

- Pengembangan Jaringan Distribusi: Perluasan dan perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih untuk memastikan akses yang merata ke seluruh wilayah.

- Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA): Membangun atau meningkatkan kapasitas IPA untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat.
- Penggunaan Teknologi Modern: Mengadopsi teknologi penyaringan dan pengolahan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Program Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan cara penggunaan air bersih yang efisien.
- Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mengundang investasi dari sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur air bersih melalui skema *public-private partnership* (PPP).

2. Infrastruktur Ruang Publik

- Pembangunan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau: Meningkatkan jumlah taman kota dan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk rekreasi dan olahraga.
- Revitalisasi Ruang Publik yang Ada: Memperbaiki dan memperbarui fasilitas yang ada agar lebih menarik dan aman bagi masyarakat.
- Pengembangan Ruang Publik Multifungsi: Membuat ruang publik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pasar, pameran, dan acara komunitas.
- Inklusivitas: Memastikan bahwa ruang publik dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk difabel dan kelompok usia lanjut.
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang publik agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Infrastruktur Irigasi

- Pembangunan dan Perawatan Saluran Irigasi: Memperbaiki dan membangun jaringan irigasi yang efisien untuk mendukung sektor pertanian.

- Teknologi Irigasi Modern: Mengadopsi teknologi irigasi yang lebih hemat air, seperti irigasi tetes dan sprinkler.
- Manajemen Air Berkelanjutan: Mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri.
- Pelatihan Petani: Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik irigasi yang efisien dan pengelolaan air yang baik.
- Penggunaan Sumber Air Alternatif: Memanfaatkan air hujan dan air limbah yang telah diolah untuk keperluan irigasi.

4. Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Sampah Terpadu: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efisien, termasuk pengurangan sampah di sumbernya, daur ulang, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- Pelestarian Ekosistem: Melindungi dan memulihkan ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan pantai.
- Program Edukasi Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui program pendidikan dan kampanye.
- Penggunaan Energi Terbarukan: Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan: Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Implementasi dan Monitoring
- Rencana Aksi Jangka Panjang: Membuat rencana aksi jangka panjang yang mencakup semua aspek ini, dengan target dan indikator kinerja yang jelas.

- Partisipasi Stakeholder: Melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam perencanaan dan implementasi.
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi-strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif.
- Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap air bersih, ruang publik, irigasi, dan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

ADMIN Bappeda. (2024, January 29). *Musrenbang Kelapa Dua Dorong Pembangunan Kolaboratif 2025*. Bappeda.Tangerangkab.Go.Id. https://bappeda.tangerangkab.go.id/detail-berita/musrenbang-kelapa-dua-dorong-pembangunan-kolaboratif-2025

Admin Web Terpadu. (2024, January 10). *Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Layani Administrasi 8 Instansi*. Tangerangkab.Go.Id. https://tangerangkab.go.id/detail-berita/mal-pelayanan-publik-kabupaten-tangerang-layani-administrasi-8-instansi

Bappedalitbang kabupaten Tangerang. (2024). *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang*.

Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang. (2024). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang 2024* (E. Kosasih & H. F. Rachmat, Eds.). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: M.E. Sharpe.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Grönroos, C. (2007). Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition. Chichester: John Wiley & Sons.

Muliana, R. (2020). *STRATEGI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN MARGASARI KEC* [Tugas Akhir, Institut Teknologi Kalimantan]. http://repository.itk.ac.id/3976/4/08161068_chapter_2.pdf

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research". Journal of Marketing, 49(4), 41-50.

Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2019-2023*.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Redaksi Pelita Tangerang. (2024, January 9). *Pemkab Tangerang Akan Rampungkan Capaian Target Infrastruktur Permukiman 2024*. Pelitatangerang.Com. https://pelitatangerang.com/2024/01/09/pemkab-tangerang-akan-rampungkan-capaian-target-infrastruktur-permukiman-2024/

Suriani, S., & Keusuma, C. N. (2015). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00

Tim Humas Metro Banten. (2022, January 4). *Pemkab Tangerang Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di 2022*. Metrobanten.Co.Id. https://metrobanten.co.id/pemkab-tangerang-prioritaskan-pembangunan-infrastruktur-di-2022/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Otonomi) Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Warsilan & Noor, Akhmad. (2015). Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan Di Kota Samarinda. Mimbar, Vol. 31, No. 2. 2015 : 359-366.

Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2003). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*. New York: McGraw-Hill.

LAMPIRAN I UJI VALIDITAS

Correlations		Total
Tersedia Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah	Pearson Correlation	.353**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah	Pearson Correlation	.468**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat	Pearson Correlation	.598**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	Pearson Correlation	.558**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.620**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tersedia Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah	Pearson Correlation	.396**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah dalam Kondisi Baik	Pearson Correlation	.637**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah telah sesuai dengan harapan masyarakat	Pearson Correlation	.708**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah memberikan Manfaat bagi aktivitas Masyarakat	Pearson Correlation	.661**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.727**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tersedia drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet	Pearson Correlation	.512**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194

Kondisi drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet	Pearson Correlation	.685**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet telah sesuai dengan harapan masyarakat	Pearson Correlation	.682**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat	Pearson Correlation	.674**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.694**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tersedia Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan	Pearson Correlation	.555**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross Untuk Penyeberangan Jalan Dalam Kondisi Baik	Pearson Correlation	.720**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross yang dibangun telah sesuai dengan harapan Masyarakat	Pearson Correlation	.736**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	Pearson Correlation	.766**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.742**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tersedia sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)	Pearson Correlation	.500**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)	Pearson Correlation	.637**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat	Pearson Correlation	.676**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) memberikan manfaat bagi aktivitas Masyarakat	Pearson Correlation	.679**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.666**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
	Pearson Correlation	.439**

Tersedia Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah	Pearson Correlation	.707**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah yang dibangun telah sesuai dengan harapan Masyarakat	Pearson Correlation	.725**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah memberikan manfaat bagi aktivitas Masyarakat	Pearson Correlation	.673**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.651**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tersedia sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun	Pearson Correlation	.373**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun	Pearson Correlation	.645**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun yang Disediakan telah sesuai dengan harapan masyarakat	Pearson Correlation	.657**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	Pearson Correlation	.615**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun yang disediakan dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.668**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tersedia Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara)	Pearson Correlation	.501**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Kondisi Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara)	Pearson Correlation	.649**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan telah sesuai dengan harapan Masyarakat	Pearson Correlation	.709**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	Pearson Correlation	.669**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	194
Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan dapat meningkatkan perekonomian	Pearson Correlation	.651**
	Sig. (2-tailed)	0,000

Total	N	194
	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	194

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN II UJI RELIABILITAS

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Tersedia Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah	238,1392	1231,157	0,341	0,749
Kondisi Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah	238,9948	1223,736	0,455	0,747
Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat	238,9536	1220,283	0,587	0,746
Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	238,7268	1219,391	0,546	0,746
Jalan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Jembatan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) Yang Menghubungkan Antar Wilayah yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	238,7784	1220,754	0,611	0,746
Tersedia Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah	239,0928	1211,888	0,367	0,745

Kondisi Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah dalam Kondisi Baik	239,2938	1212,509	0,625	0,745
Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah telah sesuai dengan harapan masyarakat	239,3196	1210,094	0,699	0,744
Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah memberikan Manfaat bagi aktivitas masyarakat	239,0361	1211,921	0,650	0,745
Unit Penyaluran Air Bersih (PDAM, Tandon Desa) dan Pipa air yang menghubungkan Sumber Air ke rumah-rumah dapat meningkatkan perekonomian	239,1598	1209,109	0,717	0,744
Tersedia drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet	238,5515	1210,673	0,492	0,745
Kondisi drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet	239,1031	1213,057	0,675	0,745
Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet telah sesuai dengan harapan masyarakat	239,1392	1214,048	0,673	0,745
Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat	238,9175	1215,278	0,664	0,745
Drainase pencegah banjir, tiang dan kabel untuk mengaliri listrik, taman-taman kecil dan lapangan terbuka serta jaringan telepon seluler dan internet yang dibangun dapat	238,9536	1213,962	0,685	0,745

meningkatkan perekonomian				
Tersedia Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan	238,9639	1200,335	0,532	0,743
Kondisi Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross Untuk Penyeberangan Jalan Dalam Kondisi Baik	239,2784	1208,306	0,711	0,744
Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat	239,2887	1208,103	0,727	0,744
Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	239,1031	1209,026	0,758	0,744
Sarana Olahraga, Taman Kota dan Trotoar/Zebra Cross untuk penyeberangan jalan dapat meningkatkan perekonomian	239,0979	1211,115	0,734	0,744
Tersedia sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)	238,2887	1217,989	0,484	0,746
Kondisi Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten)	238,9175	1217,599	0,627	0,746
Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat	238,9897	1214,383	0,667	0,745
Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat	238,8402	1213,337	0,669	0,745

Sarana pendidikan (sekolah dan lembaga pendidikan), kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan pasar (milik Desa dan Kabupaten) yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	238,8402	1216,259	0,657	0,745
Tersedia Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah	238,6495	1211,493	0,415	0,745
Kondisi Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah	239,2216	1205,510	0,696	0,743
Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah yang dibangun telah sesuai dengan harapan masyarakat	239,1907	1208,383	0,716	0,744
Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat	239,0000	1213,358	0,663	0,745
Saluran Air Dengan Debet Tinggi (sungai), Kali, Kanal dan Sungai Kecil untuk irigasi sawah yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian	239,0155	1212,419	0,639	0,745
Tersedia sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun	238,6649	1215,685	0,346	0,746
Kondisi sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun	239,1701	1211,116	0,633	0,744
Sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun yang Disediakan telah sesuai dengan harapan masyarakat	239,1856	1211,136	0,646	0,744

Sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	238,9845	1213,197	0,603	0,745
Sarana transportasi angkutan para transit (seperti: ojek, becak, ojek online, Taksi), Armada Angkutan Umum (Bus dan Angkudes), Kereta Api, Terminal dan Stasiun yang disediakan dapat meningkatkan perekonomian	238,9794	1211,471	0,657	0,744
Tersedia Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara)	238,8711	1204,320	0,476	0,743
Kondisi Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara)	239,3814	1208,413	0,636	0,744
Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan telah sesuai dengan harapan masyarakat	239,3608	1204,719	0,697	0,743
Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) mempermudah dan memperlancar aktivitas kegiatan	239,1649	1209,351	0,657	0,744
Tong Sampah dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan dapat meningkatkan perekonomian	239,2062	1208,196	0,639	0,744
Total	121,0103	310,777	1,000	0,954